RENCANA STRATEGIS

2017
2022

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat

Jalan H.M. Rafi'i No. 3 Pangkalan Bun 74112
Telp (0532) 21052 Fax (0532) 29002
Website:bappeda.kotawaringinbaratkab.go.id E-mail:bappedakabkobar@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Puji Syukur, Kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 dapat diselesaikan. Secara umum, RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan dokumen yang memuat Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Sedangkan secara lebih spesifik, RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat memuat capaian kinerja Badan, isu strategis, sampai dengan penetapan target kinerja. Melalui dokumen RENSTRA ini, maka BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dapat memperoleh pedoman dalam menentukan arah atau strategi dan sasaran strategi yang ingin di capai selama periode tahun 2017-2022.

Pada akhirnya, Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. WAHYUDI, M.Si
NIP. 19630823 199003 1 010

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Bab. I Pendahuluan 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
Bab. II Gambaran Pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat 7
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 7
2.2. Sumber Daya Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat 20
2.3. Kinerja Pelayanan 25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA . 29
Bab.III Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi 32
3.2. Telaah Visi, Misi Program Kepala Daerah Terpilih 33
3.3. Telaahan Indikator Kinerja Terhadap RENSTRA BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah, RENSTRA BAPPENAS, dan SDGs 36
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS 42
3.5. Penentuan Terhadap Isu-isu Strategis 45
Bab.IV Tujuan dan Sasaran BAPPEDA 47
Ulasan mengenai tujuan dan sasaran BAPPEDA 48
Bab. V Strategi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat 51
Ulasan mengenai tujuan dan sasaran BAPPEDA 51
Bab.VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 57
6.1. Rencana Program BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat ... 57
6.2. Rencana Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat .. 58
6.3. Rencana Pendanaan Indikatif BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat 61
Bab.VII Indikator Kinerja BAPPEDA yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 86
Ulasan mengenai indikator kinerja BAPPEDA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 86
Bab.VII Penutup 89
7.1. Kesimpulan 89
7.2. Kaidah Pelaksanaan 89
Lampiran 91

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan 20

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan 21

Tabel 2.3 Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan . 22

Tabel 2.4 Daftar Inventaris Barang BAPPEDA Kab. Kotawaringin Barat 22

Tabel 2.5 Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA (Indikator Kinerja dari SPM, IKU, IKK) 26

Tabel 2.6 Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA 28

Tabel 2.7 Tantangan dan Peluang Pelayanan BAPPEDA 29

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi 32

Tabel 3.2 Telaah Program Politis Bupati Terpilih Terhadap Nomenklatur Program 34

Tabel 3.3 Telaah Visi, dan Misi Bupati Terpilih 35

Tabel 3.4 Matrik Komparasi Capaian Sasaran RENSTRA BAPPEDA terhadap Sasaran Renstra Provinsi dan Renstra K/L, SDGs 36

Tabel 3.5 Matrik Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah 42

Tabel 3.6 Matrik Hasil Analisis Terhadap Dokumen KLHS 44

Tabel 3.7 Matrik Permasalahan Pelayanan BAPPEDA berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya 45

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA (Tabel T-C.25) 49

Tabel 5.1 Matrik Analisis SWOT 52

Tabel 5.2 Matrik Balance Score Card 53

Tabel 5.3 Matrik Kebijakan Umum 54

Tabel 5.4 Linearitas Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan (Tabel T-C26)..... 55

Tabel 5.5 Matrik Tematik Pembangunan per Tahun 56

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Prioritas I dan II Tahun 2017 BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat 62

Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Prioritas I Tahun 2018 - 2022 BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat 70

Tabel 6.3 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Prioritas II Tahun 2018 - 2022 BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat 78

Tabel 7.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 87

Gambar 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan di Daerah 7

Gambar 2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat ... 20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan tuntutan paradigma perubahan di segala bidang, pelaksanaan fungsi dan tugas pemerintahan dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang layak dan memadai bagi segenap komponen kepemerintahan, baik masyarakat, swasta dan komponen lainnya termasuk pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu seiring dengan semangat otonomi daerah, paradigma perubahan dan globalisasi, maka pelaksanaan pemerintahan kedepan harus mampu mengimbangi perkembangan dan percepatan tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk dapat menghadapi tuntutan perkembangan paradigma, maka pemerintahan kedepan harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu masyarakat yang adil dan makmur melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dimaksudkan untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada publik.

Bupati telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2021 yang memuat agenda pembangunan sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Pelaksanaan RPJMD perlu didukung oleh suatu perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berbasis kinerja. BAPPEDA dalam hal ini berperan sebagai salah satu organisasi pendukung keberhasilan pelaksanaan RPJMD dengan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA).

Renstra merupakan komitmen BAPPEDA yang digunakan sebagai tolak ukur bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu **‘Gerakan Membangun Kotaawaringin Barat Menuju Kejayaan Dengan Kerja Nyata Dan Ikhlas’.** Melalui perencanaan strategis yang baik, BAPPEDA diharapkan lebih dapat mempertajam visi dan misi serta

menyelaraskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENSTRA BAPPEDA, peraturan perundangan yang digunakan sebagai landasan hukum antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4598);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2009, Nomor 5);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022;
22. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra BAPPEDA merupakan dokumen resmi yang berisikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas BAPPEDA serta tolak ukur pencapaiannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat, antara lain :

- Memberikan pedoman penyusunan rencana kerja (renja) selama 5 tahun kedepan;
- Memberikan Instrumen pengendalian, evaluasi pelaksanaan Renstra BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017- 2022; dan
- Menjamin adanya konsistensi rencana dan pemilihan program dan kegiatan prioritas BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai dengan kebutuhan dan visi-misi daerah;

1.4 Sistematika Penyusunan

RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan RENSTRA, landasan hukum penyusunan RENSTRA, maksud dan tujuan disusunnya RENSTRA serta sistematika penyusunan RENSTRA.

BAB II Gambaran Pelayanan BAPPEDA Kotawaringin Barat

Bab ini memuat tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA, Sumber Daya BAPPEDA, Kinerja Pelayanan BAPPEDA, serta Tantangan dan peluang Pengembangan pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat, telaah Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), Renstra BAPPEDALITBANG (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan) Provinsi Kalimantan Tengah, telaah rencana tata ruang wilayah (RT RW) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis), serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi perumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA, berdasarkan sasaran dan indikator kinerja.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini menguraikan secara rinci strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikator

Bab ini memuat rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif, berdasarkan strategi dan kebijakan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini memuat indikator kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat, yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Bab ini memuat kesimpulan dan harapan demi perbaikan RENSTRA BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat periode selanjutnya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai unsur pemerintahan, Kabupaten Kotawaringin Barat, BAPPEDA memiliki peran penting dalam perencanaan pembangunan. Pertama, berperan dalam menjaga keberlangsungan sistem perencanaan pembangunan daerah. Amanat peran tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Kedua, berperan mensinergikan perencanaan untuk mengarahkan pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat saling memperkuat dan mempercepat dalam pencapaian target yang diinginkan.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat di jelaskan dalam Gambar 1.

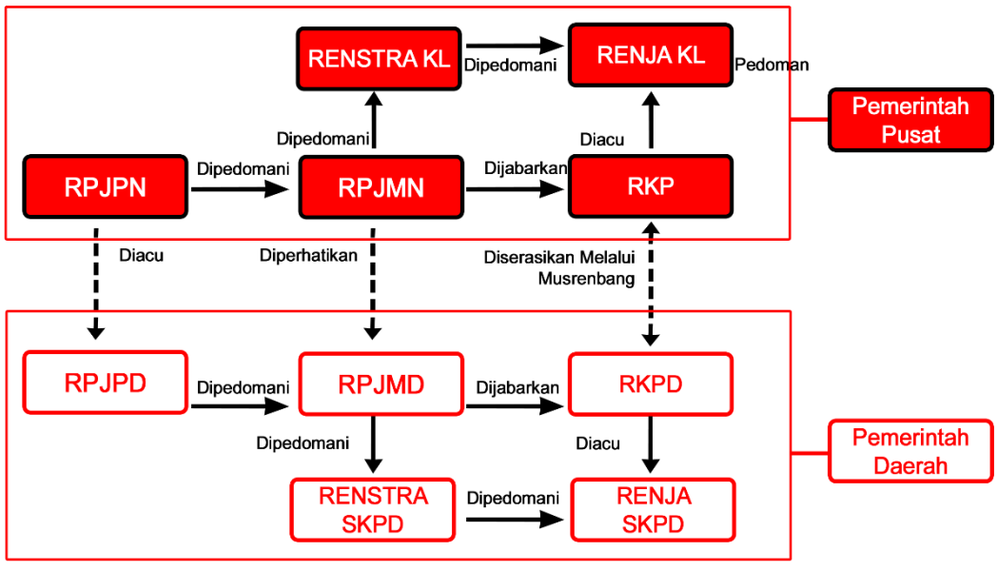

Gambar 1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan di Daerah

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan di daerah, penelitian dan pengembangan kabupaten serta penilaian atas pelaksanaannya. Adapun fungsi dari BAPPEDA adalah :

a. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah, menurut tingkat dan tahapannya;
b. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RKPD);
c. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD ;
d. Koordinasi perencanaan antar perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten maupun dengan Kelembagaan Vertikal lain;
e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan ;
f. Koordinasi dan pelaksanaan program penelitian dan dokumen perencanaan lingkup daerah kabupaten; dan
g. Pelaksanaan tugas kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga BAPPEDA.

Untuk melaksanakan fungsinya, BAPPEDA mempunyai kewenangan untuk :

a. Penetapan petunjuk pelaksanaan mengenai :
    1. Perencanaan pembangunan daerah pada skala Kabupaten;
    2. Pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten;
    3. Pedoman dan standar keserasian pengembangan perkotaan dan pedesaan skala Kabupaten;
    4. Manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala Kabupaten;
    5. Pelayanan perkotaan skala Kabupaten;
    6. Pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten.
b. Pelaksanaan :
    1. Perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
    2. Standar Pelayanan Minimal Kabupaten;
    3. Pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala Kabupaten;
    4. Penjabaran petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala Kabupaten;
    5. Petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala Kabupaten;
    6. Petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala Kabupaten;
    7. Pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala Kabupaten.
c. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala Kabupaten;

d. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh & andalan skala Kabupaten;
e. Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kabupaten;
f. Pengendalian, Evaluasi, Penilaian dan Pelaporan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah skala Kabupaten;
g. Koordinasi pendataan dan penelitian pembangunan daerah skala Kabupaten;
h. Pengaturan, pembinaan, pembangunan, & pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang;
i. Kebijakan bidang sarana dan prasarana meliputi prasarana perhubungan, infrastruktur, sumber daya alam, lingkungan hidup, pengembangan wilayah dan penataan ruang;
j. Kebijakan bidang ekonomi meliputi pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata;
k. Kebijakan bidang sosial dan pemerintahaan meliputi pendidikan, pemuda, kesehatan, olahraga, kebudayaan, sosial, pemerintahan dan aparatur.

Sebagai unsur penunjang perencanaan pembangunan, urusan penunjang bidang penelitian pengembangan daerah dan membantu Bupati dalam menentukan kebijakan, maka susunan organisasi dan masing-masing bidang, baik tugas dan fungsi rincinya, adalah sebagai berikut :

1. Kepala BAPPEDA, mempunyai tugas :

Memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan serta menetapkan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian di daerah serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas pokok BAPPEDA.

Dengan tugas pokok yang diemban, maka Kepala BAPPEDA memiliki fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijaksanaan umum dan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. Pelaksanaan koordinasi dengan semua perangkat daerah dan lembaga lainnya di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Pengoordinasian kebijakan di Bidang Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah, Sosial, Pemerintahan, Ekonomi, Sarana dan Prasarana;
d. Penyusunan pola perencanaan pembangunan daerah menurut tingkat dan tahapannya;

e. Penyusunan program-program jangka panjang, menengah dan tahunan sebagai pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
f. Penyusunan perkiraan dan menentukan anggaran/pembiayaan yang diperlukan dalam perencanaan program pembangunan daerah Kabupaten;
g. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, penilaian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Bidang Perencanaan dan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten;
h. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga BAPPEDA; dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris, mempunyai tugas :

Mengkordinasikan penyusunan program, penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif yang meliputi : perlengkapan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, protokol, humas dan rumah tangga, organisasi, tata laksana dan analisis jabatan serta perpustakaan, dokumentasi dan data pada BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

Sesuai dengan tugas pokok yang harus dilaksanakan, maka Sekretaris BAPPEDA memiliki fungsi :

a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana program, kegiatan & anggaran BAPPEDA;
b. Mengatur pelaksanaan urusan umum, kepegawaian dan perlengkapan BAPPEDA;
c. Mengatur pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan BAPPEDA;
d. Menyusun evaluasi dan pelaporan kegiatan BAPPEDA;
e. Mengkoordinasikan dan membina pelaksanaan tugas bidang secara terpadu; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPPEDA.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris BAPPEDA dibantu oleh :

2.1 Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan & Pengendalian Program

Kasubag Perencanaan & Pengendalian Program menyelenggarakan fungsi :

a. Menyiapkan bahan dan data penyusunan program dan anggaran;
b. Menghimpun data dari semua bidang sebagai bahan dalam penyusunan program dan anggaran;
c. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran;
d. Menyelenggarakaan pelaporan dinas,

e. Pembinaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan
f. melaksanakaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2.2 Kasubag Keuangan dan Aset, menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kegiatan anggaran keuangan.
b. Melaksanakan pengelolaan dan pengendalian keuangan.
c. Menghimpun, mengklarifikasi serta mengolah data dan bahan analisa pelaksanaan anggaran, pembukuan, perbendaharaan dan verifikasi.
d. Melaksanakan akuntansi keuangan, dan
e. melaksanakaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

2.3 Kasubag Umum dan Kepegawaian, menyelenggarakan fungsi :

a. Menyelenggarakan pelayanan umum, tata usaha dan surat menyurat;
b. Melakukan perencanaan kebutuhan, pengelolaan dan pengendalian, perlengkapan, perbekalan serta sarana dan prasarana;
c. Melaksanakan urusan kepegawaian;
d. Melaksanakan urusan kehumasan dan keprotokolan;
e. Melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan;
f. Menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan; dan
g. melaksanakaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris secara berkala dalam rangka kelancaaran pelaksanaan tugas kesekretariatan.

3. Kepala Bidang (Kabid) Penelitian dan Perencanaan Daerah, mempunyai tugas :

Mengoordinasikan, melaksanakan, dan membina sub bidang data informasi, penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan.

Kabid Penelitian dan Perencanaan daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Penelitian, dan Perencanaan;
b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah;
c. Pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan bidang penelitian dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah;
d. Pengoordinasian, pengelolaan, dan pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;

e. Pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Stategis Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
f. Evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang data, dan informasi, penelitian
   dan pengembangan, dan perencanaan pembangunan daerah;
g. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Bidang Penelitian, dan Perencanaan, dan
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kabid Penelitian dan Perencanaan Daerah dibantu oleh :

3.1 Kepala Sub Bidang (Kasubid) Data & Informasi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Data, dan Informasi;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
d. Pelayanan data dan informasi pembangunan daerah;
e. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan, dan pembinaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah;
f. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Data, dan Informasi; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah.

3.2 Kasubid Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan perencanaan;
d. Penyiapan bahan pelaksanaan dan pembinaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;

e. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
f. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan; dan
g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah.

3.3 Kasubid Perencanaan Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja Subbidang Perencanaan Daerah;
b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
c. Penyiapan bahan pengoordinasian, pelaksanaan, dan pembinaan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah;
d. Penyiapan bahan evaluasi kebijakan teknis penyusunan dokumen perencanaan pembangunan;
e. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Subbidang Perencanaan Daerah; dan
f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah.

4. Kabid Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas :

mengkoordinasikan, melaksanakan dan membina perencanaan bidang infrastruktur, perumahan, pertanahan, penataan ruang, pengembangan wilayah, perhubungan, komunikasi & informatika, lingkungan hidup dan sumber daya alam.

Kabid Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Sarana dan Prasarana;
b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang infrastruktur, perumahan, pertanahan, penataan ruang, pengembangan wilayah, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
c. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang infrastruktur, perumahan, pertanahan, penataan ruang,

pengembangan wilayah, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan sumber daya alam;

d. Pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang infrastruktur, perumahan, pertanahan, penataan ruang, pengembangan wilayah, perhubungan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan sumber daya alam;
e. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang Sarana dan Prasarana, dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya Kabid Sarana dan Prasarana dibantu oleh :

4.1 Kasubid Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur,

menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
d. Melakukan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana.

4.2 Kasubid Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;
b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.;
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup;

d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana.

4.3 Kasubid Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang;
d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di Bidang Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana.

5. Kabid Ekonomi, mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata. Dalam tugasnya, Kabid Ekonomi menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Bidang Ekonomi;
b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata;
c. Pengkoordinasian, pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata;
d. Pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang pertanian, perdagangan, industri, investasi, ketenaga kerjaan, koperasi dan pariwisata;
e. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang ekonomi, dan
f. Pelaksanaan tugas lain yaang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Ekonomi dibantu oleh

5.1 Kasubid Pertanian, menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pertanian.
b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pertanian.
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pertanian;
d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pertanian; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi.

5.2 Kasubid Perdagangan, Industri dan Investasi, menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusunan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Perdagangan, Industri dan Investasi;
b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Perdagangan, Industri dan Investasi;
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Perdagangan, Industri dan Investasi;
d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Perdagangan, Industri dan Investasi; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi.

5.3 Kasubid Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata;
b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata;
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata; dan
d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata.

6. Kabid Sosial dan Pemerintahan, mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan membina perencanaan bidang pendidikan, pemuda, olahraga dan kebudayaan, kesehatan dan sosial, pemerintahan dan aparatur.

Dalam tugasnya, Kabid Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Sosial dan Pemerintahan;
b. Perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang Sosial dan Pemerintahan;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan dan pembinaan perencanaan bidang Sosial dan Pemerintahan;
d. Pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis perencanaan bidang Sosial dan Pemerintahan;
e. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja bidang Sosial dan Pemerintahan; dan
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan dibantu oleh :

6.1 Kasubid Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan.

6.2 Kasubid Kesehatan dan Sosial, menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Kesehatan dan Sosial;

b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Kesehatan dan Sosial;
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Kesehatan dan Sosial
d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Kesehatan dan Sosial; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan.

6.3 Kasubid Pemerintahan dan Aparatur, menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pemerintahan dan Aparatur;
b. Melakukan koordinasi pelaksanaan rencana pembangunan dalam lingkup kegiatan bidang Pemerintahan dan Aparatur;
c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pemerintahan dan Aparatur;
d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dibidang Pemerintahan dan Aparatur; dan
e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Pemerintahan.

7. Kabid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas :

Mengkoordinasikan dan melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah.

Dalam tugasnya, Kabid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan rencana kerja Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
b. Perumusan kebijakan teknis Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah;
c. Pengkoordinasian pelaksanaan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah;
d. Penyusunan laporan pelaksanaan kerja Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan rencana pembangunan daerah; dan
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kabid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dibantu :

7.1 Kasubid Pengendalian Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kerja Pengendalian Pembangunan;

b. Melakukan koordinasi pelaksanaan Pengendalian Pembangunan;
c. Melakukan penyusunan pelaporan terhadap pengendalian pelaksanaan pembangunan; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

7.2 Kasubid Evaluasi dan Analisa Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kerja Evaluasi dan Analisa kesesuaian rencana pembangunan;
b. Melakukan koordinasi pelaksanaan Evaluasi dan Analisa kesesuaian rencana pembangunan;
c. Melakukan penyusunan pelaporan terhadap Evaluasi dan Analisa kesesuaian rencana pembangunan; dan
d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

7.3 Kasubid Pelaporan, menyelenggarakan fungsi :

a. Menyusun rencana kerja pelaporan hasil pembangunan;
b. Melakukan koordinasi penyusunan pelaporan hasil pembangunan; dan
c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.

8. **Kelompok Jabatan fungsional,** mempunyai tugas : melaksanakan sebagian tugas badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.1.2 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016, BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dibagi dalam susunan organisasi seperti yang tertera pada bagan berikut :

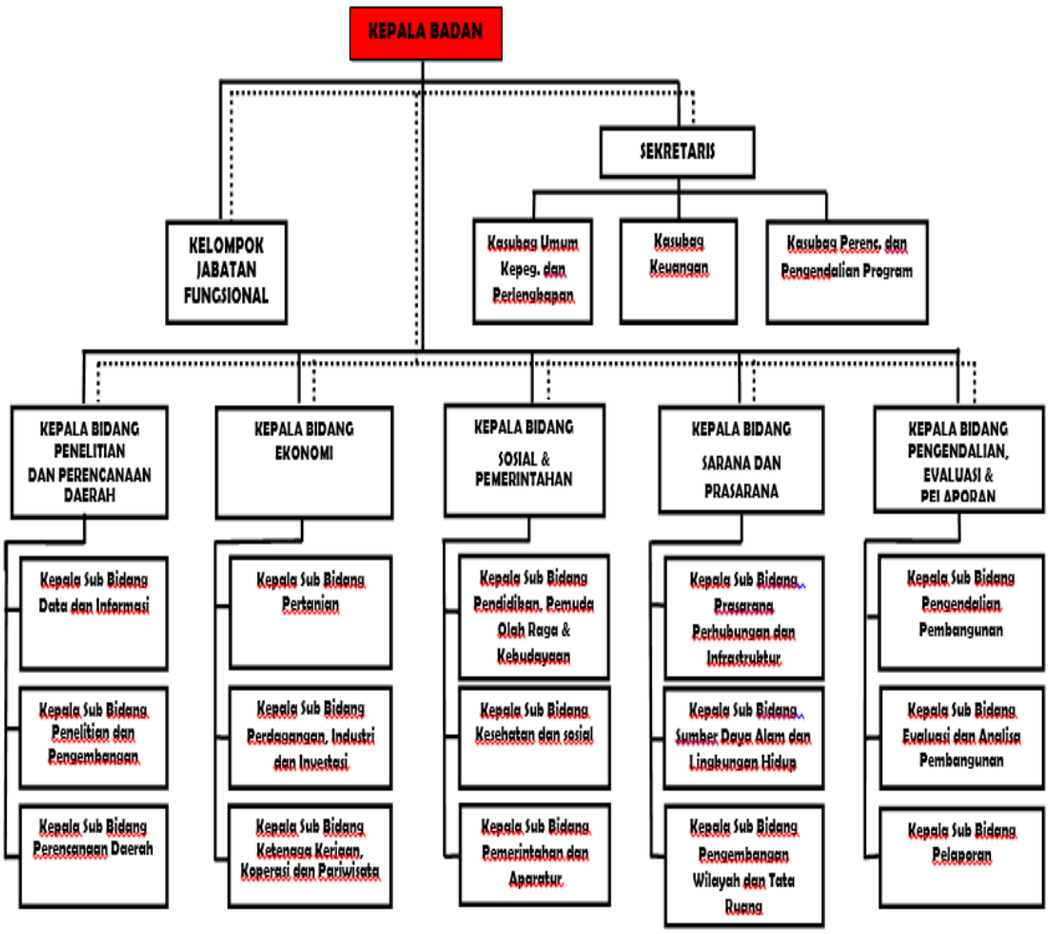

Gambar 2 Struktur Organisasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

2.2 Sumber Daya BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah aparatur BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai bulan Desember tahun 2016 berjumlah 38 orang. Komposisi masing-masing jabatan dalam struktur organisasi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
1.	Kepala BAPPEDA	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	1	3	7	11
3.	Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah	-	1	3	-	4
4.	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	-	1	3	2	6
5.	Bidang Sosial dan Pemerintahan	-	1	3	-	4

No.	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Staf	Jumlah
6.	Bidang Ekonomi	-	1	3	3	7
7.	Bidang Sarana dan Prasarana	-	1	3	2	6
8.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-
	Jumlah	**1**	**6**	**18**	**14**	**38**

Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1, dengan jenjang eselon II, BAPPEDA menjalankan fungsi koordinasi dengan SKPD lain. Bidang di BAPPEDA bermitra dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan secara intensif melaksanakan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Fungsi koordinasi dalam rangka perencanaan dan pengendalian merupakan fungsi paling strategis yang dijalankan oleh BAPPEDA melalui Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah serta Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan dengan dibantu oleh 3 (tiga) bidang yaitu Bidang Sosial dan Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Bidang Sarana dan Prasarana. Ketiga bidang tersebut bertugas mengkoordinasikan seluruh SKPD dalam kegiatan perencanan, monitoring dan evaluasi pembangunan. Untuk sekretariat BAPPEDA menjalankan peran untuk memberi dukungan penyelanggaraan kegiatan secara keseluruhan.

Kondisi kepegawaian BAPPEDA berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini :

Tabel 2.2 Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Uraian	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	Jumlah
1.	Kepala BAPPEDA	1	-	-	-	-	1
2.	Sekretariat	-	6	2	3	-	11
3.	Bidang Penelitian dan Perencanaan Daerah	-	4	-	-	-	4
4.	Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	2	4	-	-	-	6
5.	Bidang Sosial dan Pemerintahan	-	3	-	1	-	4
6.	Bidang Ekonomi	-	4	1	1	-	6
7.	Bidang Sarana dan Prasarana	1	3	-	2	-	6
8.	Pejabat Fungsional	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	**4**	**24**	**3**	**7**		**38**

Untuk mendukung kelancaran tugas, BAPPEDA dibantu oleh pegawai tidak tetap dapat dilihat pada tabel 2.3 dibawah ini :

Tabel 2.3 Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No.	Uraian	S1	SLTA	Jumlah
1.	Tenaga Administrasi	1	-	1
2.	Sopir	-	1	1
3.	Tukang Kebun	-	2	2
4.	Cleaning Service	-	2	2
5.	Penjaga Malam	-	2	2
	Jumlah	**1**	**7**	**8**

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.2, tingkat pendidikan karyawan BAPPEDA yang paling banyak adalah pendidikan S-1 sebanyak 24 orang (63,15 %). Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan BAPPEDA yang relatif tinggi ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja BAPPEDA secara umum.

Jumlah karyawan BAPPEDA yang menamatkan pendidikan S-2 cukup besar, tercatat sebanyak 4 orang. Secara prosentase, jumlah tersebut mencapai 10,52 % dari seluruh karyawan BAPPEDA, tentu ini menjadi modal dasar yang besar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai lembaga perencana secara optimal. Namun demikian, kendala dalam ketersediaan SDM yang menjadi isu strategis di BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat adalah mengenai kualitas dan kuantitas pejabat fungsional perencana dan peneliti. Sekalipun kebijakan Pemerintah Kabupaten kotawaringin Barat telah memperlihatkan keberpihakan terhadap pejabat fungsional, belum menarik minat untuk mengambil jalur karir sebagai pejabat fungsional.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022. Adapun daftar inventaris Barang BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan Tahun 2016, dapat dibaca sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 Daftar Inventaris Barang BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

Nama Barang	**Jumlah**	
	Volume	**Satuan**
Tanah kantor BAPPEDA	10.000	M2
Minibus	2	Buah
Sepeda motor	24	Buah
Global Positioning System (GPS)	1	Buah

Nama Barang	Jumlah	
	Volume	Satuan
Mesin Ketik Manual Longewagen (18)	1	Buah
Lemari Besi	21	Buah
Rak Besi/Metal	1	Buah
Rak Kayu	15	Buah
Filling Besi/Metal	15	Buah
Brand Kas	1	Buah
Lemari Kaca	3	Buah
Lemari kayu	1	Buah
Alat Penghancur Kertas	1	Unit
Papan Pengumunan	2	Buah
Meja Rapat	51	Buah
Meja Telpon	1	Buah
Meja Panjang	5	Buah
Kursi Rapat	250	Buah
Kursi Tamu	2	Buah
Kursi Lipat	50	Buah
Meja Komputer	9	Buah
Meja Biro	25	Buah
Sofa	5	Buah
Kursi Kerja	20	Buah
Gordyn	3	Buah
Rak TV	1	Buah
Karpet	3	Buah
Taplak Meja	1	Buah
Mesin Potong Rumput	2	Buah
Lemari Es	2	Buah
AC Unit	23	Buah
AC Split	5	Buah
Kipas Angin	6	Buah
Dispenser	1	Buah
Kompor Gas	1	Unit
Rak Piring	2	Buah
Televisi	3	Unit
Wireless	1	Unit
Mic Conference	1	Unit
Lambang Garuda Pancasila	1	Buah
Tangga Alumunium	2	Buah
Kaca Hias	1	Buah
Tiang Bendera	10	Buah
Mimbar/Podium	1	Buah
Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	Buah
Tandon Air	1	Unit

Nama Barang	Jumlah	
	Volume	Satuan
Mainframe	3	Unit
P.C Unit/ Komputer PC	17	Unit
Note Book	13	Unit
Ploter	1	Unit
Monitor	1	Unit
Printer	17	Unit
UPS	2	Unit
Stabilizer/Stavolt	1	Unit
Router	1	Unit
Hub	1	Unit
Modem	2	Unit
Peralatan Jaringan Lain-lain	8	Unit
Harddisk Eksternal	2	Buah
Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Buah
Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Buah
Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Buah
Meja Kerja	7	Buah
Meja Rapat Pejabat Lain-lain	2	Buah
Kursi Kerja Pejabat Eselon III	10	Buah
Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	11	Buah
Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	13	Buah
Lemari Buku untuk Perpustakaan	1	Buah
Lemari Arsip untuk arsip Dinamis	5	Buah
Proyektor + Attachment	5	Unit
Digital Audio Tape Recorder	1	Unit
Peralatan studio Visual Lain-lain	1	Unit
Layar Proyektor	1	Unit
Camera Elektronik	1	Unit
Amplifier	1	Unit
Sound System	3	Unit
Telephone (PABX)	1	Unit
Facsimile	1	Unit
Wireless Amplifier	2	Unit
Bangunan Gedung Kantor Permanen	728	M^2
Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	96	M^2
Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	72	M^2
Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen		
Bangunan Kamar Mandi	42	M^2
Pintu Pagar		
Pintu Gerbang		
Rumah Negara Gol I Lain-lain	16	M^2

Nama Barang	Jumlah	
	Volume	Satuan
Perangkat Lunak Sistem Operasi	7	Unit
Hasil Kajian (DED) / Penelitian	28	Buah

Sumber : LPPD BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016

Saat ini BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki 1 (satu) buah server yang memuat basis data sistem informasi perencanaan dan pengendalian daerah. Adapun basis sistem data informasi yang telah dibangun dan dikelola sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (sisrenbangda), dapat diakses melalui *http://203.130.214.218/sisrenbangdakobar/menu.asp*; dan
2. Sistem Informasi Pelaporan Daerah (siporda), dapat diakses melalui http://203.130.*214.218:90/siporda_2017*.

2.3 Kinerja Pelayanan

Sesuai dengan ketentuan umum dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 yang dimaksud dengan Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Pelayanan publik identik dengan representasi dari eksistensi birokrasi pemerintahan, yang menggambarkan kualitas birokrasi pemerintah. Dalam hal ini tingkat keberhasilan kinerja pelayanan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat dari capaian kinerjanya, berdasarkan sasaran target renstra periode sebelumnya.

Dalam rangka pelayanan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA melaksanakan pelayanan sebagai berikut :

a. Penyampaian informasi data Pembangunan Daerah;
b. Penyiapan bahan dan penyusunan usulan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui MUSRENBANG;
c. Penyiapan dan penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ;
d. Penyampaian informasi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kecamatan (RDTRK); dan
e. Penyampaian publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangannya.

Berikut gambaran tingkat capaian kinerja BAPPEDA, berdasarkan sasaran/target RENSTRA Bappeda tahun 2012-2016 :

Tabel. 2.5 Matrik Review Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPEDA (indikator kinerja dari SPM, IKU, IKK)

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BAPPEDA Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
						2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Jumlah RPJM yang diperdakan	Dokumen	NIHIL	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	100	-	-	-	-
2	Jumlah RKPD yang diperkadakan	Dokumen		1	-	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	100	200	200	200	200
3	Jumlah Aplikasi (SIPPD)	Sistem				1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	100	100	200	200	200
4	Jml. penelitian yang dihasilkan	Dokumen				-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Jml. penelitian yang dijadikan pedoman dlm perenc. Pemb.	Dokumen				3	4	4	4	4	5	3	3	2	2	167	75	75	50	50
6	Jumlah rapat BKPRD	kali Rapat				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	100	100	100	100	100
7	Jumlah dokumen tata ruang yang tersusun	Dokumen				3	2	2	2	2	0	1	2	2	1	0	50	100	100	50
8	Jumlah rapat evaluasi bulanan	kali Rapat				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100	100
9	Jumlah penyelenggaraan rapat koordinasi triwulan	kali Rapat				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
10	Jml. Rapat evaluasi tahunan dan rencana anggaran th. berikutnya	kali Rapat				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
11	Jumlah LKPJ	Dokumen				1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	100	100	100	100	200
12	Jumlah Rakor Bidang Ekonomi	kali Rapat				4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	100	100	75	75	75
13	Jml Rakor Bid. Sarana prasarana	kali Rapat				4	4	4	4	4	8	8	9	9	11	200	200	225	225	275
14	Jumlah Rakor Pemkesra	kali Rapat				4	4	4	4	4	4	4	4	3	7	100	100	100	75	175
15	Jumlah Rapat internal Bappeda	kali Rapat				12	12	12	12	12	20	20	20	20	20	167	167	167	167	167

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi BAPPEDA	Satuan	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra BAPPEDA Tahun ke -					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
						2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
16	Jumlah Monev Pemb. daerah	Kunjungan				2	2	2	2	2	8	8	10	10	17	400	400	500	500	850
17	Prosentase Program RPJMD yang tertuang dalam RAPBD	%				100	100	100	100	100	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
18	Jumlah Kerjasama antar daerah	MOU				1	2	2	2	2	1	0	1	0	1	100	0	50	0	50
19	Jumlah Musrenbang Kecamatan	kali Rapat				6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	100	100	100	100	100
20	Jumlah Forum Bappeda	kali Rapat				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
21	Jumlah Musrenbang kabupaten	kali Rapat				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
22	Jml. Koord. penanaman modal	kali Rapat				2	2	2	2	2	1	1	0	0	0	50	50	0	0	0
23	Jumlah pegawai yang terlatih	Pegawai				36	36	36	36	36	12	12	12	13	15	33	33	33	36	42

Berdasarkan data capaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2012-2016, capaian kinerja pada ke 15 (lima belas) Indikator Kinerja Sasaran yang dikelola menunjukkan trend positif, dimana capaian pada tahun tertentu dapat melebihi target. Pada akhir periode RENSTRA, indikator kinerja Jumlah RKPD yang diperkadakan, Jumlah Aplikasi (SIPPD), Jumlah LKPJ, Jumlah Rakor Bidang Sarana prasarana, Jumlah Rakor Pemkesra, Jumlah Rapat internal Bappeda, Jumlah Monev Pembangunan daerah melebihi target. Capaian kinerja untuk IKU diperoleh analisa dalam kondisi baik selama 5 tahun terakhir, dimana dari tahun ke tahun belum ada peningkatan yang signifikan.

Selanjutnya, dari hasil pengumpulan data anggaran dan realisasi periode RENSTRA tahun 2012-2016 diperoleh data sebagai berikut.

Tabel 2.6 Matrik Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BAPPEDA

Uraian	**Anggaran (Rp.) pada Tahun**				
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
PENDAPATAN	5.000.000	5.500.000	7.500.000	50.000.000	68.000.000
BELANJA					
Belanja Pegawai	2.425.634.000	2.569.143.000	2.699.211.000	2.546.030.000	3.079.252.000
Belanja barang dan jasa	1.541.562.500	2.037.603.200	2.325.941.750	2.461.916.950	2.913.735.000
Belanja Modal	1.973.101.500	2.247.996.800	1.614.340.050	1.877.659.050	560.500.000
JUMLAH BELANJA	**5.940.298.000**	**6.164.310.000**	**6.639.492.800**	**6.885.606.000**	**6.553.487.000**
Uraian	**Realisasi Anggaran (Rp.) pada Tahun**				
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
PENDAPATAN	15.240.000	12.502.125	41.395.818	68.600.910	51.290.455
BELANJA					
Belanja Pegawai	2.274.690.695	2.389.691.498	2.596.171.295	2.480.389.455	2.940.942.777
Belanja barang dan jasa	1.269.883.464	1.626.841.995	1.949.006.966	2.058.906.371	2.551.710.546
Belanja Modal	1.927.100.800	2.081.933.150	1.408.721.550	1.847.563.000	525.919.561
JUMLAH BELANJA	**5.471.674.959**	**6.098.466.643**	**5.953.899.811**	**6.386.848.826**	**6.018.572.884**
Uraian	**Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -**				
	2012	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**
PENDAPATAN	304,8	227,3	551,9	137,2	75,4
BELANJA					
Belanja Pegawai	93,78	93,02	96,18	97,42	95,51
Belanja barang dan jasa	82,38	79,84	83,79	83,63	87,58
Belanja Modal	97,67	92,61	87,26	98,4	93,83
JUMLAH BELANJA	**92,11**	**98,93**	**89,67**	**92,76**	**91,84**

Hasil analisa tabel diatas mengungkapkan bahwa, capaian anggaran sebagian besar kegiatan pada program telah terserap berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi anggaran. Selain itu bila dibandingkan dengan matriks capaian kinerja pelayanan dapat disimpulkan bahwa terserapnya anggaran diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

Dengan merujuk kepada deskripsi Tupoksi, Sumber Daya BAPPEDA, dan Kinerja Pelayanan BAPPEDA, tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam pelayanan BAPPEDA lima tahun kedepan adalah :

Tabel 2.7 Tantangan dan Peluang Pelayanan BAPPEDA

No	Tantangan	Peluang
1	Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah	Adanya kepercayaan masyarakaat terhadap perencanaan pembangunan
2	Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya
3	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
4	Inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah akibat adanya perubahan kebijakan	Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan
5	Sistem Informasi yang ada belum terkelola dengan baik	Pusat mendorong untuk percepatan integrasi sistem informasi

2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

a. Adanya Persepsi Masyarakat Bahwa Pembangunan Menjadi Tanggung Jawab Pemerintah

BAPPEDA mempunyai tugas dan kewenangan melaksanakan perencanaan dan pengendalian pembangunan di daerah, yang sesuai dengan kaidah-kaidah perencanaan dan terkoordinasi secara modern dan mampu menampung aspirasi masyarakat. Dalam fungsinya untuk menjembatani aspirasi masyarakat, maka Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) adalah forum perencanaan yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah desa, bekerja sama dengan masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya.

Musrenbang dimaknai akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar desa. Akan tetapi, belum optimalnya peran masyarakat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan menyebabkan hasil-hasil pembangunan juga belum dapat dirasakan secara maksimal.

b. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan

Penyelenggaraan pemerintahan dalam masyarakat dewasa ini, pada intinya adalah merupakan proses koordinasi, pengendalian, pemengaruh dan penyeimbang setiap hubungan interaksi tersebut. Dengan demikian dapat diartikan bahwa format pemerintah adalah sebagai fasilitator yakni menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

Penguatan aspek manajerial masih perlu ditingkatkan untuk memastikan tercapainya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan dan pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di tingkatan pelaksana.

c. Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan.

Menghilangkan budaya *silo* atau masing-masing unit kerja berdiri sendiri sehingga meningkatkan pandangan positif pihak eksternal perihal keutuhan tugas dan fungsi BAPPEDA.

d. **Inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah**

Lembaga pelaksana teknis kebijakan jelas terlihat tidak bisa mandiri. Intervensi dari pihak ekternal pelaksana teknis, keterbatasan waktu, keterbatasan data dan informasi membuat pelaksana akhirnya justru melaksanakan kepentingan pihak yang lebih dominan.

Pihak yang paling berpengaruh terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah saat ini mencakup pemerintah dan masyarakat (termasuk di dalamnya wakil rakyat). Sedangkan dinamika yang paling berpengaruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah, adalah proses politis. Oleh karena itu faktor politis sesungguhnya sangat dominan dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah.

2.4.2 Peluang Pengembangan BAPPEDA

a. Adanya kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan

Mitra pembangunan, seperti warga, perguruan tinggi dan organisasi masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap keterlibatan dalam menyusun rencana pembangunan daerah dan mengakui pentingnya peranan

BAPPEDA sebagai sentral dalam melakukan koordinasi, integrasi dan konsolidasi perencanaan pembangunan di daerah.

b. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat juga terus melakukan perbaikan kapasitas, baik itu kapasitas kelembagaan melalui pelaksanaan bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya, penguatan sumber daya manusia aparatur perencana di daerah, serta penyempurnaan pelaksanaan administrasi perencanaan pembangunan. Pelaksanaan pelatihan yang dilakukan telah berhasil meningkatkan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan, dan Sumber Daya Manusia yang ada.

c. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

Kebutuhan efisiensi waktu dan biaya, menyebabkan setiap pelaku perencanaan perlu menerapkan teknologi informasi dalam lingkungan kerja mereka. Penerapan teknologi informasi dapat menyebabkan perubahan pada kebiasaan kerja, sehingga dapat memenuhi tujuan efektifitas dan efisiensi kebutuhan perencanaan.

d. **Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan**

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat akan terus mengupayakan sinkronisasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, dan pengendalian proses pembangunan. Upaya tersebut telah dirintis melalui adopsi teknologi perencanaan berbasis sistem informasi.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tupoksi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat yang berkaitan dengan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi 3 (tiga) klasifikasi permasalahan pelayanan, yaitu permasalahan pada kebijakan perencanaan, kebijakan pada proses monitoring dan evaluasi serta kebijakan pada pemanfaatan hasil perencanaan. Identifikasi terhadap tataran kebijakan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat, dapat dijelaskan dalam matriks sebagaimana berikut.

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah.	Dokumen perencanaan pembangunan daerah telah tersusun dengan baik. Namun sinkronisasi antara proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evalusi, sampai dalam tahap pelaporan untuk mencapai akuntabilitas kinerja organisasi belum maksimal.	IKU (Indikator Kinerja Utama) Bappeda Kobar 2012-2016	Peningkatan kompetensi perencana dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah	Rotasi kepemimpinan termasuk adanya regulasi yang dinamis menyebabkan kurang stabilnya perencanaan didaerah.	Belum optimalnya proses perencanaan tata kelola pemerintahan yang baik
			Pengawalan terhadap pelaksanaan pembangunan melalui Musrenbang dan Monev (Monitoring & Evaluasi di setiap bidang perencanaan)	Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan urusan pemerintahan menjadi kewenangan daerah	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis dan transparan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
			Fungsi BAPPEDA sendiri sebagai penampung aspirasi masyarakat, yang dapat mewujudkan pembangunan dalam bentuk makro.	Seringnya kebijakan yang telah ditetapkan belum berdasar pada prioritas.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan bidang Sarana dan Prasarana, bidang Penelitian dan Pengembangan , bidaang Ekonomi dan bidang Sosial dan Pemerintahan dalam rangka menguatkan tata pemerintahan yang bersih dan efektif

3.2 Telaah Visi, Misi Program Kepala Daerah Terpilih

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD Tahun 2017 – 2022, visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat adalah :

” GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS”

Visi kepala daerah ini didukung oleh lima misi untuk mewujudkannya, dengan misi yang terkait dengan tupoksi BAPPEDA yaitu “Memperkuat Tata Pemerintahan Yang Bersih, Efektif, Demokratis Dan Transparan”.

Memperhatikan sasaran strategis daerah yang menjadi tugas utama Bappeda yang harus tercapai di lima tahun kedepan adalah meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja (sakip) dengan indikator nilai sakip kabupaten dengan strategi membangun sistem kelola pemerintahan yang integratif dan inovatif melalui optimalisasi penerapan teknologi informasi (*e-governance*) dan reformasi birokrasi. Salah satu upaya dalam mewujudkan sasaran strategis daerah, peran Bappeda melalui penguatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan peningkatan

efektifitas penerapan SAKIP, khususnya perencanaan, evaluasi dan pelaporan, yaitu :

a. Integrasi perencanaan yang lebih berorientasi kinerja dengan skenario evaluasi keberhasilannya ;
b. Pelaporan yang lebih berorientasi pada hasil;
c. Perubahan paradigma perencanaan dan perbaikan praktik perilaku perencanaan yang berorientasi hasil.

Dengan strategi membangun sistem kelola pemerintah yang integratif dan inovatif melalui optimalisasi penerapan teknologi informasi (*e-governance*) dan reformasi birokrasi adalah dimana dalam setiap tugas dan fungsinya perangkat daerah memberi sentuhan inovasi pada setiap aktifitas pembangunan berupa layanan kepada masyarakat, merencanakan program, melaksanakan aktifitas pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi serta mempertanggungjawabkan hasil (*outcome*) pembangunan daerah.

Dalam janji politik secara makro dirumuskan ke dalam visi misi yang kemudian diterjemahkan dalam beberapa program politis pembangunan bupati terpilih berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Salah satu program politis yang menjadi tugas Bappeda dan di definisikan ke dalam nomenkelatur program adalah :

Tabel 3.2 Telaah Program Politis Bupati Terpilih Terhadap Program Politis

Program Politis	Definisi Nomenkelatur Program
1 Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah sejalan dengan program jangka panjang pembangunan nasional sesuai dengan keadaan dan potensi daerah.	1 Program Penelitian dan Perencanaan Pembngunan Daerah
2 Merencanakan/membuat program pembangunan (masterplan) Kotawaringin Baaraat dalam program jangka panjang berikutnya.	
3 Merumuskan pelaksanaan pembangunan daerah dengan skala prioritas sesuai kebutuhan dan urgensinya.	2 Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Keterkaitan antara permasalahan BAPPEDA berserta faktor penghambat dan pendorong dengan Visi, Misi Bupati dan wakil Bupati terpilih untuk selanjutnya dapat dijelaskan dalam matriks berikut.

Tabel 3.3 Telaah Visi dan Misi Bupati Terpilih

Visi : GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS				
No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
1	Memperkuat tata pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	Belum optimalnya proses perencanaan tata kelola pemerintahan yang baik	Masih rendahnya kemampuaan SDM perencana dan peneliti dalam analisa perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Upaya penguatan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem.
		masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis dan transparan	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pelayanan (perencanaan, monitoring dan pelaporan)	Pola pembangunan partisipatif telah banyak digunakan didalam berbagai perencanaan pembangunan
		Belum optimalnya pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan bidang Sarana dan Prasarana, bidang Penelitian dan Pengembangan, bidaang Ekonomi dan bidang Sosial dan Pemerintahan dalam rangka menguatkan tata pemerintahan yang bersih dan efektif	Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi

3.3 Telaahan Indikator Kinerja terhadap RENSTRA BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah, RENSTRA BAPPENAS, dan SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Telaahan terhadap RENSTRA BAPPEDALITBANG (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), RENSTRA BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan nasional), dan kebijakan SDGs (*Sustainable Development Goals*) dilakukan untuk mengakomodir berbagai agenda pembangunan, yang memerlukan keterlibatan pemerintah kabupaten. Selain itu telaahan ini bermanfaat untuk melihat beberapa hal, yang mungkin akan menghambat pembangunan di kabupaten yang berhubungan dengan Tupoksi BAPPEDA.

Tabel 3.4 Matrik Komparasi Capaian Sasaran Renstra BAPPEDA terhadap Sasaran Renstra Provinsi dan Renstra K/L, SDGs

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten Kobar	Sasaran pada Renstra BAPPEDALITBANG Provinsi Kalteng	Sasaran pada Renstra Kementerian BAPPENAS	SDGs	Permasalahan OPD
1	Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen perencanaan pembangunan daerah telah tersusun dengan baik. Namun sinkronisasi antara proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring serta evalusi, sampai dalam tahap pelaoran untuk mencapai akuntabilitas kinerja organisasi belum	Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten	Manajemen tata kelola pemerintahan di kementrian PPN/Bappenas yang baik dan bersih	Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.	Belum optimalnya proses perencanaan tata kelola pemerintahan yang baik
			Terwujudnya perencanaan daerah dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas.	Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergi dan kredibel	Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.	masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi pembangunan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis dan transparan
			Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif		Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan bidang Sarana dan Prasarana, bidang Penelitian dan Pengembangan, bidaang Ekonomi

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten Kobar	Sasaran pada Renstra BAPPEDALITBANG Provinsi Kalteng	Sasaran pada Renstra Kementerian BAPPENAS	SDGs	Permasalahan OPD
		maksimal.	Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah.		Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.	dan bidang Sosial dan Pemerintahan dalam rangka menguatkan tata pemerintahan yang bersih dan efektif
					Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.	
					Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.	
					Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.	

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten Kobar	Sasaran pada Renstra BAPPEDALITBANG Provinsi Kalteng	Sasaran pada Renstra Kementerian BAPPENAS	SDGs	Permasalahan OPD
					Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.	
					Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.	
					Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.	
					Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.	
					Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.	
					Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan	

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten Kobar	Sasaran pada Renstra BAPPEDALITBANG Provinsi Kalteng	Sasaran pada Renstra Kementerian BAPPENAS	SDGs	Permasalahan OPD
					iklim dan dampaknya.	
					Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.	
					Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan,mengelola hutan secara lestari, menghentikanpengguruna n, memulihkan degradasi lahan, serta menghenti-kan kehilangan keanekaragaman hayati.	

No	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten Kobar	Sasaran pada Renstra BAPPEDALITBANG Provinsi Kalteng	Sasaran pada Renstra Kementerian BAPPENAS	SDGs	Permasalahan OPD
					Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.	
					Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.	

3.3.1 Telaah Renstra BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah

Seluruh komitmen RENSTRA BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah terangkum dalam 4 (empat) sasaran, yaitu :

a. Terwujudnya perencanaan daerah yang konsisten;
b. Terwujudnya perencanaan daerah dengan tersusunnya dokumen perencanaan yang berkualitas.
c. Terwujudnya pengendalian program pembangunan yang efektif; dan
d. Terwujudnya hasil penelitian yang berkualitas yang mendukung pembangunan dan daya saing daerah.

Sasaran tersebut dapat menjembatani keinginan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dalam usahanya mencapai dokumen perencanaan pembangunan yang berkualitas. Ke empat sasaran tersebut juga telah bersinergi dengan Tugas dan Fungsi BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat yang menjalankan agenda perencanaan, monitoring dan pengendalian, serta menentukan kebijakan dalam bidang penelitian dan pengembangan.

3.3.2 Telaah Renstra BAPPENAS

Telaah terhadap Renstra Kementerian dilakukan terhadap dokumen Renstra Kementerian PPN/BAPPENAS mengingat BAPPEDA mempunyai tugas dan fungsi yang sama dalam perencanaan pembangunan. Dalam Renstra BAPPENAS dicantumkan bahwa peran Kementerian PPN/BAPPENAS sebagai *think tank* (wadah pemikiran/studi kebijakan). Tugas penting Kementerian PPN/Bappenas lainnya adalah membangun dan mengintegrasikan sistem manajemen pembangunan yang selama ini melibatkan instansi, perguruan tinggi dan organisasi profesi, diatur dengan kebijakan atau peraturan yang selama ini masih belum terintegrasi dengan baik. Optimalisasi sumber daya manusia yang ada perlu terus ditingkatkan secara solid dan terintegrasi agar dapat meningkatkan kualitas analisa, telaahan dan kajian kebijakan pembangunan untuk membantu perumusan kebijakan pembangunan nasional yang tepat, terarah dan dapat dilaksanakan.

Tujuan utama dari Kementerian PPN/Bappenas yaitu terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan terlaksananya penugasan lainnya dari Presiden/pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan Nasional. Tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu perencanaan dan pendanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi dengan didukung 4 faktor utama yaitu pengelolaan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana kerja.

3.3.3 Telaah SDGs (*Sustainable Development Goals*)

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai bagian dari pemerintah daerah di Indonesia memiliki peran untuk turut serta mendukung pencapaian SDGs. Hal yang perlu dilakukan adalah mengintegrasikan tujuan SDGs dalam

perencanaan pembangunan daerah. Tujuan SDGs perlu disosialisasikan di lingkungan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan menghadirkan para pakar terkait penjelasan indikator SDGs sehingga dipahami dan menjadi "*common goals*" yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan, baik untuk jangka pendek (RKPD) maupun jangka menengah (RPJMD).

Untuk mewujudkan Goals dari SDGs itulah peran BAPPEDA dilibatkan sebagai fasilitator dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan, untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat dalam mengoptimalkan pembangunan daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

Peran BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap tata ruang wilayah dapat dijelaskan dalam matrik berikut.

Tabel 3.5 Matrik Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengem-bangan Pelayanan SKPD
1	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) merupakan pusat kegitan permukiman perkotaan dengan hirarki pelayanan skala regional/kebupaten (hirarki I)	meliputi Kota Pangkalan Bun, sebagai pusat pemerintahan	Peran Bappeda dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang serta **konsistensi pemanfaatan ruang** dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang		
2	Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp) merupakan pusat permukiman perkotaan dengan skala pelayanan kecamatan (hirarki II) dengan orientasi kegiatan berupa pemerintahan, perdagangan dan jasa, pelayanan masyarakat dan lain-lain.	terletak di ibukota Kecamatan yaitu di Kota Kumai, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat.			

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan SKPD	Arahan Lokasi Pengem-bangan Pelayanan SKPD
3	Pusat Pelayanan Kawasan (PKK) merupakan pusat permukiman/kegiatan dengan skala kecamatan atau beberapa desa/kelurahan (hirarki III) dengan arahan pengembangan dan pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya.	Meliputi Pangkalan Banteng, IKK Pangkalan Lada, IKK Kotawaringin Lama dan IKK Arut Utara, desa Runtu Kecamatan Arut Selatan , desa Teluk Bogam dan desa Kubu di Kecamatan Kumai, desa Sidomulyo Kecamatan Pangkalan Banteng, dan Despot Riam Durian Kecamatan Kotawaringin Lama.	Peran Bappeda dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan Tata Ruang serta **konsistensi pemanfaatan ruang** dengan mengintegrasikannya ke dalam dokumen perencanaan pembangunan terkait penegakan peraturan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang		
4	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) merupakan pusat permukiman/kegiatan dengan skala desa/kelurahan atau beberapa kampung (hirarki IV) dengan arahan pengembangan sakala pelayanan sesuai dengan fungsi dan potensi yang dimilikinya.	meliputi seluruh pusat desa di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat			

Sedangkan telaahan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis dapat dijelaskan dalam matrik berikut.

Tabel. 3.6 Matrik Hasil Analisis terhadap Dokumen KLHS

No	Aspek Kajian	Ringkasan KLHS	Implikasi terhadap Pelayanan BAPPEDA	Catatan bagi Perumusan Program dan Kegiatan BAPPEDA
1	Penjarahan dan pembakaran hutan, serta perusakan lingkungan perairan dan laut	Pelaksanaan dan pengawasan regulasi secara tegas untuk aktivitas penjarahan dan pembakaran hutan, serta perusakan lingkungan perairan dan laut	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup	Sebagai pertimbangan dalam perumusan program bagi Bappeda terkait program yang berkaitan dengan peningkatan pengawasan dalam penjarahan dan pembakaran hutan, serta perusakan lingkungan perairan dan laut
2	Pengembangan potensi pertanian	Menyusun Rencana Strategis Pengembangan Pertanian sebagai acuan dalam pengembangan potensi pertanian dan untuk mencapai ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	Sebagai pertimbangan dalam perumusan program bagi Bappeda terkait program yang berkaitan dengan peningkatan koordinasi dalam penjarahan dan pembakaran hutan, serta perusakan lingkungan perairan dan laut
3	Pengembangan teknologi pertanian/ perkebunan	Peningkatan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi pertanian/perkebunan yang aman/ramah lingkungan, murah dan mudah untuk dilaksanakan oleh petani secara umum.		Sebagai pertimbangan dalam perumusan program bagi Bappeda terkait program yang berkaitan dengan peningkatan kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mengembangkan teknologi pertanian/perkebunan yang aman/ramah lingkungan,

Tabel. 3.7 Matrik Permasalahan Pelayanan BAPPEDA berdasarkan Analisis KLHS beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Hasil KLHS terkait Tugas dan Fungsi BAPPEDA	Permasalahan Pelayanan BAPPEDA	Sebagai Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Sebagai pertimbangan dalam perumusan program bagi Bappeda terkait program yang berkaitan dengan aspek kajian	Belum optimalnya pemanfaatan hasil perencanaan pembangunan bidang Sarana dan Prasarana, bidang Penelitian dan Pengembangan, bidang Ekonomi dan bidang Sosial dan Pemerintahan dalam rangka menguatkan tata pemerintahan yang bersih dan efektif	Masih rendahnya kemampuaan SDM perencana dan peneliti dalam analisa perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Upaya penguatan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem.
		Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pelayanan (perencanaan, monitoring dan pelaporan)	Pola pembangunan partisipatif telah banyak digunakan didalam berbagai perencanaan pembangunan
		Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah	Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis pembangunan BAPPEDA di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2017-2022 didasarkan pada hasil telaah gambaran pelayanan perangkat daerah, sasaran jangka menengah pada RENSTRA Kementerian, sasaran jangka menengah pada RENSTRA BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah, target-target SDGs, hasil telaahan struktur ruang wilayah, dan hasil kajian terhadap KLHS. Penentuan isu-isu strategis disusun sebagai bahan untuk pembenahan dan hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan.

Berdasarkan pada telaah yang dilakukan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif dan transparan berbasis teknologi informasi;
2. Upaya penguatan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem;
3. Pola pembangunan partisipatif telah banyak digunakan didalam berbagai perencanaan pembangunan;
4. Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
5. Masih rendahnya kemampuaan SDM perencana dan peneliti dalam analisa perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;

6. Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pelayanan (perencanaan, monitoring dan pelaporan;
7. Adanya kepercayaan masyarakaat terhadap perencanaan pembangunan;
8. Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya;
9. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara meningkat;
10. Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan;
11. Pusat mendorong untuk percepatan integrasi sistem informasi;
12. Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah;
13. Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan;
14. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan;
15. Sistem Informasi yang ada belum terkelola dengan baik; dan
16. Inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah akibat adanya perubahan kebijakan nasional maupun provinsi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN BAPPEDA

MISI PEMBANGUNAN

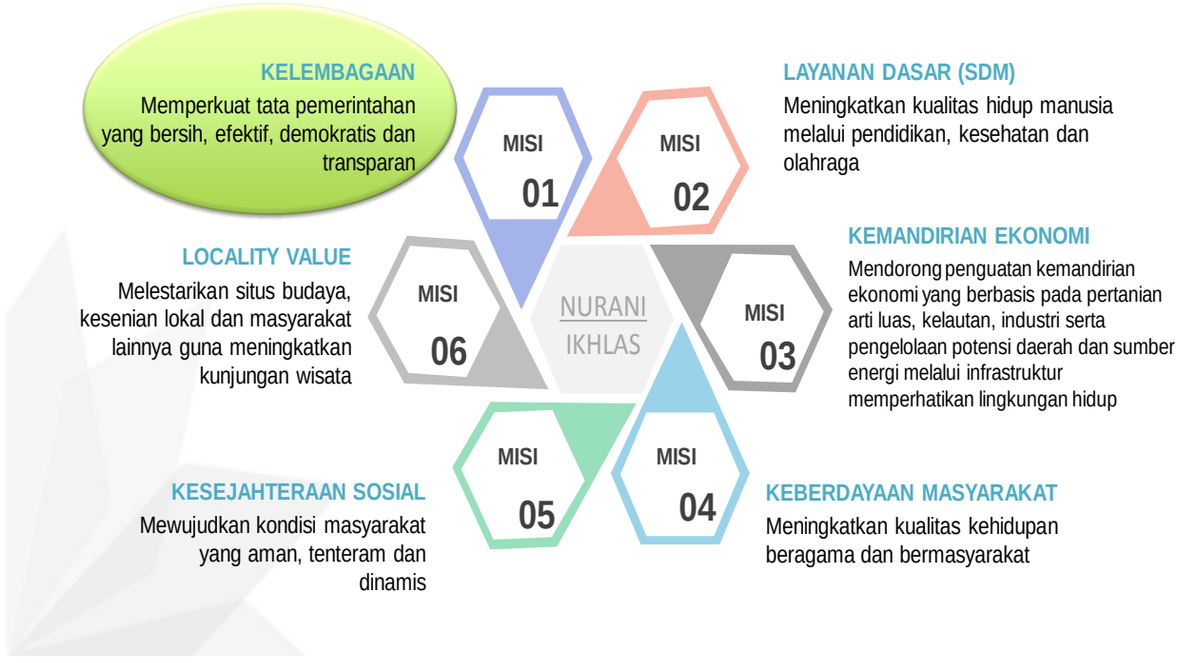

Mengacu pada Visi dan Misi RPJMD yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu :

1. Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat;
2. Meningkatkan kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral;

Tujuan tersebut selaras dengan tujuan yang melekat pada Misi I RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 yang berbunyi "Memperkuat Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan efisien". Dalam hal ini BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat diharapkan menjadi koordinator dan fasilitator yang mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang baik, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat tercapai.

Adapun gambaran mengenai keselarasan tujuan dan sasaran BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA (Tabel T-C.25)

No	Tujuan BAPPEDA	Sasaran SKPD	Indikator Tujuan/Sasaran BAPPEDA	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -					Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Akhir Periode RENSTRA
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat.	80	80	80	90	90	90
		Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	80	80	80	90	90	90
2	Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas		Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral.	80	80	80	90	90	90
		Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	80	80	80	90	90	90
		Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	80	80	80	90	90	90

No	Tujuan BAPPEDA	Sasaran SKPD	Indikator Tujuan/Sasaran BAPPEDA	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -					Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Akhir Periode RENSTRA
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
3	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel		Indeks Kepuasan Aparatur	80	80	80	90	90	90
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	80	80	80	90	90	90

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran, atau kumpulan sasaran yang inherent adalah dengan dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength*, *weakness*, *opportunity*, dan *threats*).

Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Identifikasi faktor internal dan ekternal, serta analisis SWOT yang dimaksud nampak dalam gambar dibawah ini :

Tabel 5.1 Matrik Analisis SWOT

Internal / Eksternal		KEKUATAN (Strenghts)	KELEMAHAN (Weakness)
		Semakin besarnya tuntutan sistem perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, partisipatif & transparan berbasis IT	Masih terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah
		Upaya penguatan melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas individu, lembaga dan sistem.	Masih rendahnya kemampuan SDM perencana dan peneliti dalam analisa perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
		Pola pembangunan partisipatif telah banyak digunakan didalam berbagai perencanaan pembangunan	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pelayanan (perencanaan, monitoring dan pelaporan)
PELUANG (Opportunities)	Adanya kepercayaan masyarakaat terhadap perencanaan pembangunan	Meningkatkan efisiensi dan Efektifitas anggaran untuk mengoptimal program priorita	Mengoptimalkan teknologi informasi dalam memenuhi data dan informasi dasar pembangunan
	Adanya kesempatan untuk meningkatkan kemampuan kapasitas aparatur melalui bimtek, diklat, dan pendidikan non formal lainnya		
	Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara meningkat	Memanfaatkaan kemampuan SDM untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan berbasis teknologi informasi	Meningkatkan kapasitas aparatur perencana
	Adanya integrasi perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan		Meningkatkan penyediaan dan pemutakhiran data & informasi perencanaan pembangunan yang tepat dan akurat
	Pusat mendorong untuk percepatan integrasi sistem informasi		
ANCAMAN (Threats)	Adanya persepsi masyarakat bahwa pembangunan menjadi tanggung jawab pemerintah	Memperkuat koordinasi perencanaan demi terciptanya keterpaduan antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Mendorong peningkatan integrasi dan sikronisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
	Masih adanya ego-sektoral dalam perencanaan pembangunan		
	Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan	Meningkatkan pelayanan informasi perencanaan pembangunan daerah	Menjalankan proses perencanaan sesuai mekanisme peraturan
	Sistem Informasi yang ada belum terkelola dengan baik		
	Inkonsistensi perencanaan pembangunan daerah akibat adanya perubahan kebijakan nasional maupun provinsi		

Merujuk pada alternatif strategi tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan dengan berdasarkan pada balanced scorecard melalui empat perspektif yang terdiri dari perspektif masyarakat, perspektif proses internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan. Adapun definisi dari 4 (empat) perspektif tersebut adalah :

1 Perspektif masyarakat adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi yang akan dilayani, dan layanan apa yang harus diberikan.
2 Perspektif internal adalah kebijakan bagi lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi.

3 Perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah.

4 Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah.

Identifikasi faktor tersebut sangat penting untuk memahami kondisi riil BAPPEDA. Atas dasar informasi yang telah terbagi dalam 4 (empat) kuadran di atas, dirumuskan alternatif strategi, yang akan merumuskan strategi untuk dapat menentukan arah kebijakan. sebagai berikut :

Tabel 5.2 Matriks Balance Score Card

No.	PRESPEKTIF	Alternatif Strategi	STRATEGI
1	Perspektif Masyarakat	Meningkatkan pelayanan informasi perencanaan pembangunan daerah	Mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui intergrasi sistem informasi dalam singkronisasi perencanaan, penganggaran, Pengendalian dan pelaporan
2	Perspektif proses Internal	Menjalankaan proses perencanaan sesuai mekanisme peraturan	
		Meningkatkan penyediaan dan pemutakhiran data & informasi perencanaan pembangunan yang tepat dan akurat	
3	Perspektif Kelembagaan	Meningkatkan kapasitas aparatur perencana	
		Memperkuat koordinasi perencanaan demi terciptanya keterpaduan antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	
		Mendorong peningkatan integrasi dan sikronisasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	
		Mengoptimalkan teknologi informasi dalam memenuhi data dan informasi dasar pembangunan	
		Memanfaatkaan kemampuan SDM untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien dan transparan berbasis teknologi informasi	
4	Perspektif Keuangan	Meningkatkan efisiensi dan Efektifitas anggaran untuk mengoptimal program prioritas	

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Perumusan arah kebijakan di dasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang ***inherent*** tersebut kemudian di rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan di rumuskan untuk mendukung strategi. Berdasarkan pada strategi yang telah ditetapkan, maka penekanan arah kebijakan BAPPEDA dirincikan sebagai berikut :

Tabel 5.3 Tabel Kebijakan Umum

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM
Mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui intergrasi sistem informasi dalam singkronisasi perencanaan, penganggaran, Pengendalian dan pelaporan	Melaksanakan pendataan perencanaan pembangunan daerah	Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan daerah
	Melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait perencanaan pembangunan	
	Meningkatkan validitas data sebagai dasar monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	Memperkuat sistem informasi data terpadu	
	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di bidang ekonomi, sosial pemerintahan, dan sarana prasarana	Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
		Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan
	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
	Meningkatkan sistem koordinasi aparatur perencana pembangunan daerah	Semua program yang pelaksanaannya membutuhkan koordinasi termasuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Berdasarkan deskripsi arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat periode 2017-2022 terhadap Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada perumusan tabel berikut.

Tabel 5.4 Linearitas Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan (Tabel T-C26)

VISI: GERAKAN MEMBANGUN KOTAWARINGIN BARAT MENUJU KEJAYAAN DENGAN KERJA NYATA DAN IKHLAS

MISI : MEMPERKUAT TATA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS DAN TRANSPARAN

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat.	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Mendorong perencanaan pembangunan yang berkualitas melalui intergrasi sistem informasi dalam singkronisasi perencanaan, penganggaran, Pengendalian dan pelaporan	Melaksanakan pendataan perencanaan pembangunan daerah
				Melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait perencanaan pembangunan
2	Meningkatkan kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral	Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan		Meningkatkan validitas data sebagai dasar monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
				Memperkuat sistem informasi data terpadu
		Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)		Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di bidang ekonomi, sosial pemerintahan, dan sarana prasarana
3	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana
				Meningkatkan sistem koordinasi aparatur perencana pembangunan daerah

Setelah di rumuskan arah kebijakan, setiap pernyataan arah kebijakan di rumuskan secara spesifik terhadap horizon waktu. Dengan adanya penentuan horison waktu pencapaian arah kebijakan secara logis kapan suatu arah kebijakan dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi arah kebijakan lainnya. Urut-urutan arah kebijakan dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun untuk penyusunan RENSTRA.

Arah kebijakan pembangunan terangkum dalam tabel berikut dengan tematik pembangunan pertahun BAPPEDA Kotawaringin Barat.

Tabel 5.5 Matrik Tematik Pembangunan per Tahun

NO	ARAH KEBIJAKAN	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Memperkuat sistem informasi data terpadu						
2	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan di bidang ekonomi, sosial pemerintahan, dan sarana prasarana						
3	Meningkatkan sistem koordinasi aparatur perencana pembangunan daerah						
4	Melaksanakan penelitian dan pengembangan terkait perencanaan pembangunan						
5	Meningkatkan validitas data sebagai dasar monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan						
6	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur perencana						
7	Melaksanakan pendataan perencanaan pembangunan daerah						

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Rencana Program BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 perumusan program berdasarkan empat persfektif *balanced scorecard* dan program BAPPEDA masuk dalam klasifikasi perspektif proses internal (P2) adalah perspektif bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa publik dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai.

Selama lima tahun kedepan, Bappeda akan menjalankan program rutin dan program-program dalam rangka pemenuhan visi misi bupati terpilih.

Program dalam rangka pemenuhan visi misi, adalah :

a. Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan daerah;
b. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
c. Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah dan Lingkungan Hidup;
d. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
e. Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan;
f. Program Pengembangan Data/Informasi;
g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
h. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar;
i. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam;
j. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
k. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi; dan
l. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya.

Program rutin yang dilaksanakan setiap tahun, adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
c. Program peningkatan disiplin aparatur;
d. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS;
e. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; dan
f. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

6.2 Rencana Kegiatan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

1. Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan daerah :
   a. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
   b. Penyusunan Rancangan RKPD;
   c. Penetapan RKPD;
   d. Review RPJMD;
   e. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD;
   f. Penetapan RPJMD;
   g. Review RPJPD;
   h. Penyusunan, Pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi;
   i. Penelitian dan Pengembangan IPTEK dan Kebijakan Pembangunan.
2. Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah :
   a. Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah;
   b. Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
   c. Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; dan
   d. Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah.
3. Program Perencanaan Pembangunan Sarana-Prasarana Wilayah & Lingkungan Hidup :
   a. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur;
   b. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
   c. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang.
4. Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi :
   a. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pertanian dalam arti luas;
   b. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Perdagangan, Industri dan Investasi; dan
   c. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata.
5. Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan :
   a. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
   b. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur; dan
   c. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial.

6. Program Pengembangan Data/Informasi :
    1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan;
7. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh :
    1. Koordinasi Penetapan Rencana Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
    2. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh;
8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar :
    1. Koordinasi Perencanaan Air Minum Drainase dan Sanitasi Perkotaan;
9. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam :
    1. Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan;
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah :
    1. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD;
    2. Penetapan RPJMD;
    3. Penyusunan Rancangan RKPD;
    4. Penetapan RKPD;
    5. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD;
    6. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ);
    7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; dan
    8. Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi :
    1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi;
12. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya :
    1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya; dan
    2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
13. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
    1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional;
    4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
    5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
    6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga;
11. Penyediaan Makanan dan Minuman; dan
12. Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.

13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
    1. Pembangunan Gedung Kantor;
    2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
    3. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor;
    4. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
    5. Pengadaan Mebeleur;
    6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
    7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
    8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor;
    9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor; dan
    10. Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor.
11. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
    1. Pengadaan Mesin/Kartu Absensi;
    2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya; dan
    3. Pengadan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu.
12. Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS;
    1. Pemulangan Pegawai yang Pensiun.
13. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
    1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
14. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
    1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD; dan
    2. Penyusunan laporan keuangan semesteran; dan
    3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

6.3 Rencana Pendanaan Indikatif BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

Untuk selanjutnya penjabaran dari program, kegiatan dan kerangka pendanaan Bappeda tahun 2017 terangkum dalam tabel 6.1. Penjabaran dari program, kegiatan dan kerangka pendanaan BAPPEDA tahun 2018 - 2022 terangkum dalam tabel 6.2, dan penjabaran dari program, kegiatan dan kerangka pendanaan BAPPEDA tahun 2018 - 2022 terangkum dalam tabel 6.3.

Tabel. 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2017
BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

Tujuan BAPPEDA	Sasaran BAPPEDA	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
J U M L A H T O T A L								**6.434.741.000**	
Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel			**Indeks Kepuasan Aparatur**	**Indeks Kepuasan Aparatur**	**n.a**	**na**	**80%**		**Kepala BAPPEDA**
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran		**Persentase ketercukupan administrasi perkantoran**	**Persentase ketercukupan administrasi perkantoran**	**n.a**	**na**	**80%**		**Kepala BAPPEDA**
			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan layanan administrasi kantoran**			**80%**	**1.070.270.800**	**Sekretaris**
			Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat terkirim			12 paket/surat	300.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			12 Bulan	202.200.000	
			Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan			20 lembar	5.700.000	
			Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan			12 Bulan	210.874.500	
			Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jenis penyediaan jasa kebersihan kantor			18 jenis	125.502.800	
			Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah jenis peralatan kerja yang diperbaiki			6 jenis	45.250.000	
			Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan			55 jenis	57.464.000	
			Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan			3 jenis	24.269.500	

Tujuan BAPPEDA	Sasaran BAPPEDA	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
			Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan			6 Jenis	8.340.000	
			Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan			5 Jenis	83.650.000	
			Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum			400 org/20 kali rapat	46.495.000	
			Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			35 kali perjalanan diinas	260.225.000	Kasubag. Perenc. Pelap & Pengend. Program
			Program peningkatan sar. & pras. aparatur	**Cakupan layanan sar. & pras. kantor**			**80%**	**1.368.090.000**	**Sekretaris**
			Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun			1 unit	1.160.900.000	Kasubid. Prasarana, Perhubungan dan Infrastruktur
			Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan			2 unit	14.000.000	Kasubag. Keuangan & Aset
			Pengadaan mebeleur	Jenis dan mebel yang diadakan			2 Jenis	26.000.000	
			Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala			20 buah	159.200.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
			Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala			2 jenis	7.990.000	

Tujuan BAPPEDA	Sasaran BAPPEDA	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
			Program peningkatan disiplin aparatur	**Tingkat kepatuhan aparatur**			**80%**	**50.050.000**	**Sekretaris**
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkpannya yang diadakan			45 stel baju PDH	24.750.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
			Pengadan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian hari-hari tertentu yang diadakan			46 stel baju batik	25.300.000	
			Program fasilitasi pindahpurna tugas PNS	Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS			80%	11.350.000	Sekretaris
			Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan			1 orang	11.350.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
			Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	**Presentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya**			**80%**	**112.000.000**	**Sekretaris**
			Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			18 orang	112.000.000	Kasubag. Perenc. Pelap & Pengend. Program
			Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**			**80%**	**4.260.000**	**Sekretaris**
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			1 dokumen	1.919.000	Kasubag. Perenc. Pelap & Pengend. Program
			Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran			1 dokumen	125.000	Kasubag. Keuangan & Aset
			Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah lap.keuangan akhir tahun			1 dokumen	2.216.000	

Tujuan BAPPEDA	Sasaran BAPPEDA	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat			**Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat.**		**n.a**	**na**	**80%**		**Kepala BAPPEDA**
	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.		**Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan**		**n.a**	**na**	**80%**		**Kepala BAPPEDA**
			Program Pengembangan data/informasi	**Prosentase ketersediaan data/informasi perencanaan dan litbang**			**80%**	**47.007.500**	**Kabid. Penelitan dan Dokumen Perencanaan**
			Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah			1 dokumen SID	47.007.500	Kasubbid. Data dan Informasi
Meningkatkan kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral			**Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral**		**n.a**	**na**	**80%**		**Kepala BAPPEDA**
	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial		**Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)**		**n.a**	**na**	**80%**		**Kepala BAPPEDA**
			Program Perenc. Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	**Prosentase ketersediaan dok. Prenc. & pengend. pemanfaatan ruang**			**80%**	**1.239.081.000**	Kabid.Sarana dan Prasarana
			Koordinasi penetapan renc. Pengemb. Wil. Strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya dokumen Perencanaan Tata Ruang			2 dokumen	982.155.000	Kasubbid. SDA dan LH
			Peny. Perenc. pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Tersedianya dokumen KLHS RPJMD			1 dokumen	256.926.000	
			Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar	**Prosentase pemanfaatan dokumen perenc. sanitasi**			**80%**	**87.400.000**	Kabid.Sarana dan Prasarana

Tujuan BAPPEDA	Sasaran BAPPEDA	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
	Pemerintahan)		Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan	Tersediannya dokumen review SSK dan penentuan desa sasaran pamsimas III			1 dokumen	87.400.000	Kasubbid. SDA dan LH
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat			**Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat.**		**n.a**	**na**	**80%**		**Kepala BAPPEDA**
	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.		**Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan**		**n.a**	**na**	**80%**		**Kepala BAPPEDA**
			Program perencanaan pembangunan daerah	**Prosentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD**			**80%**	**1.808.153.700**	**Kabid. Penelitan dan Dokumen Perencanaan**
				Persentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana			**80%**		Kabid. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
									Kabid. Ekonomi
			Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RPJMD			6 kali	837.311.000	Kasubid. Perdagangan, Industri dan Investasi
			Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen perda RPJMD			1 dokumen	267.086.500	Kasubbid. Data dan Informasi
			Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD			2 dokumen	25.551.500	Kasubbid. Perencanaan Daerah
			Penetapan RKPD	Jumlah pelaksanaan musrenbang RKPD			8 kali	148.201.700	
			Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah dokumen RKPD dan P-RKPD			2 dokumen	64.183.000	Kasubid. Litbang

Tujuan BAPPEDA	Sasaran BAPPEDA	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
Meningkatkan kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral			**Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral**		**n.a**	**na**	**80%**		**Kepala BAPPEDA**
	Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan		**Persentase capaian kinerja SKPD**		**n.a**	**na**	**80%**		**Kepala BAPPEDA**
			Kordinasi peny. Laporan Ket. Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Jumlah dokumen LKPj			1 dokumen	64.875.000	Kasubid. Pelaporan
			Monev & pelap. pelaksanaan rencana pemb. daerah	jumlah rapat koordinasi			12 Kali rapat	238.445.000	Kasubid. Pengendalian Pembangunan
			Pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah sistem informasi perenc. pemb. daerah			2 sistem	162.500.000	Kasubbid. Perencanaan Daerah
Meningkatkan kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral			**Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral**		**n.a**	**na**	**80%**		**Kepala BAPPEDA**
	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati		**Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)**		**n.a**	**na**	**80%**		**Kepala BAPPEDA**
			Program perencanaan pembangunan ekonomi	**Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan ekonomi**			**80%**	**109.562.500**	**Kepala Bidang Ekonomi**
			Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	Jumlah rapat koordinasi perenc. bidang ekonomi			10 Kali Rapat	109.562.500	Kasubid. Pertanian

Tujuan BAPPEDA	Sasaran BAPPEDA	Kode	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan		Penanggung Jawab
					Target	Rp.	Target	Rp.	
	(Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)								
			Program perencanaan pembangunan sosial budaya	**Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan sosial budaya**			**80%**	**178.330.500**	**Sosial dan Pemerintahan**
			Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial bud.	Jumlah rapat koordinasi bidang sosial budaya			6 kali rapat	113.401.500	Kasubid. Kesehatan & Sosial
			Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen pelaksanaan monitoring bidang sosial & pemerintahan			2 dokumen	64.929.000	Kasubid. Pemerintahan dan Aparatur
			Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA	**Prosentase pemanfaatan dokumen perencanaan infrastruktur**			**80%**	**349.185.000**	**Kabid. Sarana dan Prasarana**
			Koordinasi penyusunan masterplan prasarana perhub. daerah	Jumlah dokumen			1 Dokumen	349.185.000	Kasubid.Prasarana, Perhubungan dan Infrastruktur

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. WAHYUDI, M.Si
NIP. 19630923 199003 1 010

Tabel. 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2018-2022
BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat				**Indeks Kepuasan Aparatur**	%	80		80		90		90		90		Kepala BAPPEDA
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkoantoran			**Persentase ketercukupan administrasi perkantoran**	%	80	3.536.589.400	80	2.890.111.500	90	2.909.222.030	90	3.814.364.759	90	4.732.318.836	Kepala BAPPEDA
		00.0.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	%	80	158.500.000	80	126.000.000	90	126.000.000	90	126.000.000	90	200.000.000	Sekretaris
		05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	18	158.500.000	23	126.000.000	23	126.000.000	23	126.000.000	23	200.000.000	Kasubag. Perenc. Pelaporan. & Pengendalian Program

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		00.0.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**%**	**80**	**1.296.089.400**	**80**	**1.231.559.500**	**90**	**1.281.757.838**	**90**	**1.524.731.400**	**90**	**1.705.618.636**	**Sekretaris**
		01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat terkirim	Paket/ surat	10	300.00	10	300.00	10	300.00	10	300.00	10	500.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
		01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	278.400.000	12	246.600.000	12	253.200.000	12	260.000.00	12	300.000.000	
		01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Unit	20	6.300.000	20	7.350.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	20.000.000	
		01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	311.694.000	12	317.927.880	12	324.286.438	12	350.000.000	12	400.000.000	

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor yang Disediakan	Jenis	22	142.251.400	22	142.251.400	22	142.251.400	22	142.251.400	22	209.373.000	
		01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah Alat Kerja yang diperbaiki	Unit	54	41.950.000	57	43.450.000	69	43.950.000	77	43.950.000	84	43.950.000	
		01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	Jenis	51	58.374.000	55	70.000.000	55	75.000.000	55	90.000.000	55	100.000.000	
		01.11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	6	32.190.000	6	24.020.220	6	29.040.000	6	29.000.000	6	29.065.636	
		01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jenis	7	9.930.000	7	12.510.000	7	12.080.000	7	12.080.000	7	12.080.000	

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		01.13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jenis	9	182.500.000	7	96.150.000	8	97.650.000	7	170.650.000	7	120.650.000	
		01.14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	buah	9	17.200.000	1	3.000.000	2	6.000.000	4	108.000.000	5	111.000.000	
		01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum rapat	Orang	400	6.000.000	400	8.000.000	400	8.000.000	400	8.500.000	400	9.000.000	
		01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	28	209.000.000	40	260.000.000	40	280.000.000	40	300.000.000	40	350.000.000	Kasubag. Perenc. Pelap& Pengendalian Program
		00.0.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor**	**%**	**80**	**1.965.130.000**	**80**	**1.421.700.000**	**90**	**1.371.400.000**	**90**	**1.953.200.000**	**90**	**2.662.200.000**	**Sekretaris**

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		02.03	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dibangun	Unit	2	1.448.000.000	3	400.000.000	3	450.000.000	2	378.000.000	3	868.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
		02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	400.000.000	
		02.07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan	Jenis	6	135.500.000	5	70.000.000	6	77.000.000	5	110.000.000	5	210.000.000	
		02.09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan	Unit	1	5.000.000	1	2.000.000	1	100.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	
		02.10	Pengadaan mebeleur	Jumlah Jenis mebel yang diadakan	Jenis	5	204.000.000	7	173.000.000	6	244.000.000	7	421.000.000	8	395.000.000	
		02.13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	Unit	4	88.250.000	1	25.000.000	1	55.000.000	4	295.000.000	3	200.000.000	

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		02.15	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	Unit	20	71.500.000	20	80.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000	20	80.000.000	
		02.17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara	Jenis	2	9.130.000	1	9.600.000	2	10.800.000	1	9.600.000	1	9.600.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
		02.19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	Jenis	1	3.750.000	2	12.100.000	2	12.100.000	2	12.600.000	2	12.600.000	
		02.23	Rehab sedang/berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang diperbaiki/rehab	Unit	-	-	3	650.000.000	3	342.500.000	6	720.000.000	3	500.000.000	
		00.0.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Tingkat kepatuhan aparatur**	**%**	**80**	**73.500.000**	**80**	**66.000.000**	**90**	**78.000.000**	**90**	**78.000.000**	**90**	**88.000.000**	**Sekretaris**

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi	unit	1	7.500	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
		03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Orang	60	33.000.000	60	33.000.000	65	39.000.000	65	39.000.000	65	39.000.000	
		03.05	Pengadan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Orang	60	33.000.000	60	33.000.000	65	39.000.000	65	39.000.000	65	39.000.000	
		00.0.04	**Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS**	**Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS**	**%**	**80**	**20.000.000**	**80**	**20.000.000**	**90**	**20.000.000**	**90**	**26.000.000**	**90**	**30.000.000**	**Sekretaris**
		04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	26.000.000	1	30.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		00.0.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**%**	**80**	**23.370.000**	**80**	**24.852.000**	**90**	**26.064.192**	**90**	**28.433.359**	**90**	**28.500.000**	**Sekretaris**
		06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dok	1	450.000	1	1.712.000	1	2.712.000	1	3.000.000	1	3.000.000	Kasubag. Perenc. Pelaporan. & Pengendalian Program
		06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Laporan	1	225.000	1	140.000	1	352.192	1	433.359	1	500.000	Kasubag. Keuangan & Aset
		06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pemenuhan laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	22.695.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	
		T O T A L				**3.536.589.400**		**2.890.111.500**		**2.909.222.030**		**3.814.364.759**		**4.732.318.836**		

Tabel. 6.3 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan (Urusan Perencanaan dan Penelitian/Pengembangan) Tahun 2018-2022

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat				Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat.	%	80		80		90		90		**90**		**Kepala BAPPEDA**
	Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.			Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	%	80		80		90		90		**90**		**Kepala BAPPEDA**
		40.7.15	**Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase hasil penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan**	**%**	**80**	**314.813.000**	**80**	**801.000.000**	**90**	**1.337.000.000**	**90**	**2.150.000.000**	**90**	**1.700.000.000**	**Kepala Bidang Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah**
		15.01	Review RPJPD	Jumlah dokumen review RPJPD yang dihasilkan	Dok	-	-	-	-	1	550.000.000	-	-	-	-	Kasubid Perencanaan Daerah
		15.02	Review RPJMD	Jumlah dokumen review RPJMD yang dihasilkan	Dok	-	-	1	250.000.000	-	-	1	250.000.000	-	-	
		15.03	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Terlaksanannya kegiatan musrenbang RPJMD	Keg.	-	-	-	-	-	-	1	650.000.000	-	-	Kasubid Perencanaan Daerah
		15.04	Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD yang dihasilkan	Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	1	350.000.000	

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		15.05	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	Keg.	8	169.138.000	8	190.000.000	8	260.000.000	8	300.000.000	8	350.000.000	Kasubid Data dan Informasi
		15.06	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen rancangan RKPD yang dihasilkan	Dok	2	19.500.00	2	50.000.000	2	60.000.000	2	100.000.000	2	125.000.000	
		15.07	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan	Dok	2	51.875.000	2	61.000.000	2	67.000.000	2	100.000.000	2	125.000.000	
		15.08	Penyusunan, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah	%	100	36.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	
		15.09	Penelitian dan pengembangan IPTEK dan kebijakan pembangunan	Jumlah fasilitasi koordinasi penelitian&pengembangan pembangunan daerah	Kali rapat	4	38.300.000	10	200.000.00	10	300.000.000	10	500.000.000	10	50.000.000	Kasubid Penelitian dan Pengembangan

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
Meningkatkan kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral				Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral	%	80		80		90		90		**90**		**Kepala BAPPEDA**
	Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan			Persentase capaian kinerja SKPD	%	80		80		90		90		**90**		**Kepala BAPPEDA**
		40.3.15	**Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Presentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana**	**%**	**80**	**657.849.600**	**80**	**879.288.500**	**90**	**990.736.000**	**90**	**1.261.505.000**	**90**	**1.500.000.000**	**Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**
		15.01	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	Laporan	12	176.950.000	12	322.135.000	12	370.620.000	12	401.505.000	12	450.000.000	Kasubid Pengendalian Pembangunan
		15.02	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	Sistem informasi	3	326.000.000	3	247.500.000	3	300.000.000	3	500.000.000	3	600.000.000	Kasubid Pengendalian Pembangunan

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		15.03	Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Laporan	5	108.250.000	5	171.585.000	5	175.320.000	5	200.000.000	5	250.000.000	Kasubid Evaluasi dan Analisa Perencanaan
		15.04	Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	Dok	4	46.649.600	4	138.068.500	4	144.796.000	4	160.000.000	4	200.000.000	Kasubid Pelaporan
	Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan			Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	%	80		80		90		90		**90**		**Kepala BAPPEDA**
		40.3.16	**Program perencanaan pembangunan sarana-prasarana wilayah dan lingkungan hidup**	**Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan**	**%**	**80**	**180.545.000**	**80**	**1.140.000.000**	**90**	**1.510.000.000**	**90**	**1.250.000.000**	**90**	**950.000.000**	**Kepala Bidang Sarana dan Prasarana**

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
	bupati (Sarana Prasarana , Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	16.01	Penyusunan perencanaan program pembangunan prasarana perhubungaan dan infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur	Dok	1	60.775.000	4	480.000.000	3	500.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	Kasubid Prasarana Perhubungan dan Prasarana
		16.01	Penyusunan perencanaan program pembangunan prasarana perhubungan dan infrastruktur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan bidang prasarana perhubungan dan infrastruktur	Dok	1	60.775.000	4	480.000.000	3	500.000.000	2	200.000.000	2	300.000.000	Kasubid prasarana perhubungan dan infrastruktur
		16.02	Penyusunan perencanaan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Dok	1	57.800.000	2	360.000.000	2	535.000.000	2	575.000.000	1	150.000.000	Kasubid SDA dan Lingkungan Hidup

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		16.03	Penyusun perencanaan program pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang	Dok	1	61.970.000	1	300.000.000	1	475.000.000	1	475.000.000	1	500.000.000	Kasubid Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
		40.3.17	**Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi**	**Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan**	**%**	**80**	**370.500.000**	**80**	**1.316.100.000**	**90**	**1.490.145.000**	**90**	**1.850.000.000**	**90**	**2.150.000.000**	**Kepala Bidang Ekonomi**
		17.01	Penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian dalam arti luas	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas	Dok	2	150.500.000	3	438.700.000	3	350.145.000	3	650.000.000	3	750.000.000	Kasubid Pertanian
		17.02	Penyusunan perencanaan program pemb. perdagangan, industri dan investasi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perdagangan, industri dan investasi	Dok	2	147.000.000	3	438.700.000	3	595.000.000	3	550.000.000	3	700.000.000	Kasubid Perdagangan, Industri & Investasi

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		17.03	Penyusunan perencanaan program pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	Dok	2	73.000.000	3	438.700.000	3	545.000.000	3	650.000.000	3	700.000.000	Kasubid Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata
		40.3.18	**Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan**	**Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Pemerintahan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan**	**%**	**80**	**715.350.000**	**80**	**1.753.500.000**	**90**	**1.873.200.000**	**90**	**1.750.000.000**	**90**	**2.300.000.000**	**Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan**
		18.01	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Dok	2	220.550.000	2	351.650.000	3	609.499.996	2	550.000.000	1	300.000.000	Kasubid Pendidikan, Pemuda & Olahraga

Tujuan SKPD	Sasaran SKPD	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
						2018		2019		2020		2021		2022		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		18.02	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial	Dok	2	246.400.000	6	1.100.350.000	4	704.200.000	2	650.000.000	3	1.300.000.000	Kasubid Kesehatan dan Sosial
		18.03	Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Dok	2	248.400.000	2	301.500.000	2	559.500.000	2	550.000.000	2	700.000.000	Kasubid Pemerintahan dan Aparatur
						2.239.057.600		**5.889.888.500**		**7.201.081.000**		**8.261.505.000**		**8.600.000.000**		
Total Belanja Langsung						**5.775.647.000**		**8.780.000.000**		**10.110.303.030**		**12.075.869.759**		**13.332.318.636**		

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. WARYUDI, M.Si
NIP. [illegible] 199003 1 010

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unitkerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayananpada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasiperangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat. Indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BAPPEDA dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Lebih jelasnya, indikator Kinerja BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat yang akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1 Indikator Kinerja BAPPEDA yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Tabel T-C-26)

No	Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran RPMD	Tujuan BAPPEDA	Sasaran BAPPEDA	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD & BAPPEDA	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -					Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Akhir Periode RENSTRA
							2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)				***Indeks Good Governance* (dalam skala)**	NA	NA	6,04	6,14	6,2	6,24	6,28
		Meningkatnya sistem Akuntabilitas Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan			**Nilai SAKIP Kabupaten**	C	CC	B	A	A	A	A
			Meningkatkan Perencanaan daerah yang tepat dan akurat		Persentase dokumen perencanaan pembangunan daerah yang tepat dan akurat.	NA	80	80	80	90	90	90
				Terpenuhinya ketepatan dan keakuratan perencanaan pembangunan daerah.	Persentase terpenuhinya aspek kualitas dalam dokumen perencanaan	NA	80	80	80	90	90	90
			Meningkatkan ketersediaan informasi perencanaan pembangunan sektoral yang berkualitas		Persentase kualitas informasi perencanaan pembangunan sektoral.	NA	80	80	80	90	90	90
				Terpenuhinya kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Persentase capaian kinerja SKPD	NA	80	80	80	90	90	90

No	Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	Indikator Kinerja Sasaran RPMD	Tujuan BAPPEDA	Sasaran BAPPEDA	Indikator Tujuan/Sasaran RPJMD & BAPPEDA	Kondisi Awal (2016)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -					Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Akhir Periode RENSTRA
							2017	2018	2019	2020	2021	2022
				Terpenuhinya persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	Persentase pemanfaatan hasil kajian bidang perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan bupati (Sarana Prasarana, Ekonomi, Sosial Pemerintahan)	NA	80	80	80	90	90	90
			Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel		Indeks Kepuasan Aparatur	NA	80	80	80	90	90	90
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase ketercukupan administrasi perkantoran	NA	80	80	80	90	90	90

BAB VIII

PENUTUP

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis (Renstra) BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BAPPEDA. Disamping itu Renstra ini berfungsi sebagai pedomaan, penentu arah, sasaran dan tujuan untuk 5 (lima) tahun kedepan. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Bappeda yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022.

Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022 akan menjadi pedoman dan landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan BAPPEDA sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaan serta komitmen pimpinan dan staf di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat. semoga Rencana Strategis BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka “Memperkuat Tata Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan”.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat 2017-2022. Atas dasar itu, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja sasaran (*impact*) Renstra BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pejabat eselon III di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja program (*outcome*) Renstra BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat;
3. Pejabat eselon IV dan aparatur di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat bertanggungjawab atas pencapaian kinerja kegiatan (*output*) Renstra BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat;
4. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam lima tahun;

Pelaksanaan Renstra BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan melalui Rencana Kerja (RENJA) BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat setiap tahun dengan realisasi melalui DPA- BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat.

Lampiran Indikator Program dan Kegiatan

Tahun 2018 - 2022

Lampiran Tabel. Rinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2018-2022

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
00.0.05	**Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**	**%**	**80**	**158.500.000**	**80**	**126.000.000**	**90**	**126.000.000**	**90**	**126.000.000**	**90**	**200.000.000**	**Sekretaris**
05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah SDM yang mengikuti Bimbingan Teknis	Orang	18	158.500.000	23	126.000.000	23	126.000.000	23	126.000.000	23	200.000.000	Kasubag. Perenc. Pelaporan. & Pengendalian Program
00.0.01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Cakupan layanan administrasi perkantoran**	**%**	**80**	**1.296.089.400**	**80**	**1.231.559.500**	**90**	**1.281.757.838**	**90**	**1.524.731.400**	**90**	**1.705.618.636**	**Sekretaris**
01.01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah paket/surat terkirim	Paket/ surat	10	300.00	10	300.00	10	300.00	10	300.00	10	500.000	Kasubag Umum&Kepegawaian

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan	12	278.400.000	12	246.600.000	12	253.200.000	12	260.000.00	12	300.000.000	
01.06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Disediakan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan	Unit	20	6.300.000	20	7.350.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	20.000.000	
01.07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Bulan	12	311.694.000	12	317.927.880	12	324.286.438	12	350.000.000	12	400.000.000	
01.08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah Jenis Alat Kebersihan Kantor yang Disediakan	Jenis	22	142.251.400	22	142.251.400	22	142.251.400	22	142.251.400	22	209.373.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
01.09	**Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja**	**Jumlah Alat Kerja yang diperbaiki**	**Unit**	**54**	**41.950.000**	**57**	**43.450.000**	**69**	**43.950.000**	**77**	**43.950.000**	**84**	**43.950.000**	
		Pemeliharaan ploter	Unit	1	2.000.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	
		Pemeliharaan mainframe/server	Unit	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	
		Pemeliharaan komputer	Unit	14	10.080.000	19	10.080.000	22	10.080.000	22	10.080.000	22	10.080.000	
		Pemeliharaan note book	Unit	11	7.920.000	13	7.920.000	19	7.920.000	24	7.920.000	28	7.920.000	
		Pemeliharaan printer	Unit	23	14.950.000	15	14.950.000	18	14.950.000	21	14.950.000	24	14.950.000	
		Pemeliharaan proyektor	Unit	4	2.000.000	8	2.000.000	8	2.000.000	8	2.000.000	8	2.000.000	
01.10	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Jenis ATK yang disediakan	Jenis	51	58.374.000	55	70.000.000	55	75.000.000	55	90.000.000	55	100.000.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)									Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022	
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
01.11	**Penyediaan barang cetakan dan penggandaan**	**Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan**	**Jenis**	**6**	**32.190.000**	**6**	**24.020.220**	**6**	**29.040.000**	**6**	**29.000.000**	**6**	**29.065.636**	
		Cetak Amplop	Jenis	3	740.000	3	2.020.220	3	3.020.220	3	5.000.000	3	5.000.000	
		Cetak Stopmap	Jenis	1	6.000.000	1	1.000.000	1	5.019.780	1	2.000.000	1	2.000.000	
		Cetak Tutup gelas	Lembar	500	1.000.000	500	1.000.000	500	1.000.000	500	2.000.000	500	2.000.000	
		fotocopy	Lembar	80.000	24.450.000	80.000	20.000.000	80.000	20.000.000	80.000	20.000.000	80.000	20.065.636	
01.12	**Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor**	**Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan**	**Jenis**	**7**	**9.930.000**	**7**	**12.510.000**	**7**	**12.080.000**	**7**	**12.080.000**	**7**	**12.080.000**	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Lampu	Lusin	14	5.880.000	14	6.250.000	14	5.880.000	14	5.880.000	14	5.880.000	
		Baterai Besar	Pak	10	2.400.000	10	1.920.000	10	1.920.000	10	1.920.000	10	1.920.000	
		Kabel	Rol	0	-	1	350.000	1	350.000	1	350.000	1	350.000	
		Senter	Buah	0	-	2	800.000	2	800.000	2	800.000	2	800.000	
		Terminal	Lusin	0	-	1	240.000	1	180.000	1	180.000	1	180.000	
		Baterai Kecil	Pak	0	-	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	12	2.400.000	
		Lampu Sorot	Buah	6	1.650.000	2	550.000	2	550.000	2	550.000	2	550.000	
01.13	**Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor**	**Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan**	**Jenis**	**9**	**182.500.000**	**7**	**96.150.000**	**8**	**97.650.000**	**7**	**170.650.000**	**7**	**120.650.000**	
		Flash Disk	Buah	0	-	10	1.500.000	10	1.500.000	10	1.500.000	10	1.500.000	
		mouse	Buah	0	-	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000	10	2.000.000	
		keyboard	Buah	0	-	1	150.000	1	150.000	1	150.000	1	150.000	
		Laptop	Unit	6	60.000.000	5	50.000.000	3	30.000.000	4	40.000.000	4	40.000.000	
		Komputer Pc allin one	Unit	4	48.000.000	1	12.000.000	0	-	5	60.000.000	5	60.000.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Printer	Unit	5	15.000.000	3	9.000.000	6	18.000.000	3	9.000.000	3	9.000.000	
		Catrige	Buah	8	9.600.000	8	8.000.000	8	8.000.000	8	8.000.000	8	8.000.000	
		kipas angin berdiri tornado	Unit	2	2.000.000	0	-	1	6.000.000	0	-	0	-	
		Acces Point	Paket	1	47.900.000	0	-	0	-	1	50.000.000	0	-	
		Grounding	Paket	0	-	0	-	1	32.000.000	0	-	0	-	
01.14	**Penyediaan peralatan rumah tangga**	**Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan**	**Buah**	**9**	**17.200.000**	**1**	**3.000.000**	**2**	**6.000.000**	**4**	**108.000.000**	**5**	**111.000.000**	
		Dispenser	Buah	2	6.000.000	0	-	1	6.000.000	0	-	2	-	
		pemanas air	Buah	6	10.200.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Tabung gas	Buah	1	1.100.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
		lemari kaca	Buah	0	-	1	3.000.000	0	-	1	3.000.000	0	-	
		gorden kantor	Paket	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	
		gerobak sampah	Buah	0	-	0	-	0	-	2	5.000.000	2	5.000.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
01.17	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makan dan minum rapat	Orang	400	6.000.000	400	8.000.000	400	8.000.000	400	8.500.000	400	9.000.000	
01.18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	kegiatan	28	209.000.000	40	260.000.000	40	280.000.000	40	300.000.000	40	350.000.000	Kasubag. Perenc. Pelaporan. & Pengendalian Program
00.0.02	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**Cakupan layanan sarana dan prasarana kantor**	**%**	**80**	**1.965.130.000**	**80**	**1.421.700.000**	**90**	**1.371.400.000**	**90**	**1.953.200.000**	**90**	**2.662.200.000**	**Sekretaris**
02.03	**Pembangunan gedung kantor**	**Jumlah gedung kantor yang dibangun**	**Unit**	**2**	**1.448.000.000**	**3**	**400.000.000**	**3**	**450.000.000**	**2**	**378.000.000**	**3**	**868.000.000**	Kasubag. Keuangan & Aset
		pembangunan tahap II	Unit	1	1.287.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Pembangunan teras rg.makan	Unit	1	160.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Pembangunan taman	Unit	0	-	1	150.000.000	0	-	0	-	1	350.000.000	
		Pembangunan parkir	Unit	0	-	1	150.000.000	0	-	0	-	1	259.000.000	
		Pembangunan selasar penghubung kantor dan mushola	Unit	0	-	0	-	0	-	1	250.000.000	1	259.000.000	
		pembangunan pagar	Unit	0	-	0	-	1	200.000.000	0	-	0	-	
		pembuatan papan nama kantor	Unit	0	-	0	-	1	50.000.000	0	-	0	-	
		pembangunan gazebo	Unit	0	-	0	-	1	200.000.000	1	128.000.000	0	-	
		Pemasangan wallpaper ruang transit,ruang makan, ruang kepala,ruang darmawanita,loby	Paket	0	-	1	100.000.000	0	-	0	-	0	-	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
02.05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diadakan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	1	400.000.000	
02.07	**Pengadaan perlengkapan gedung kantor**	**Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan**	**Jenis**	**6**	**135.500.000**	**5**	**70.000.000**	**6**	**77.000.000**	**5**	**110.000.000**	**5**	**210.000.000**	
		proyektor	Unit	3	30.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
		layar proyektor autometic	Unit	0	-	1	5.000.000	0	-	0	-	0	-	
		sound system	Set	1	10.000.000	1	5.000.000	0	-	0	-	0	-	
		Televisi	Unit	2	19.000.000	0	-	0	-	2	-	0	-	
		mic conference	Unit	0	-	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	
		wireles amplifier	Unit	3	10.500.000	0	-	0	-	1	-	2	50.000.000	
		CCTV	Titik	20	50.000.000	0	-	8	10.000.000	0	-	20	100.000.000	
		AC	Unit	2	16.000.000	3	30.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	
		Kamera digital	Unit	0	-	0	-	1	7.000.000	0	-	0	-	
		Handycamp	Unit	0	-	0	-	1	10.000.000	0	-	0	-	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
02.09	**Pengadaan peralatan gedung kantor**	**Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan**	**Unit**	**1**	**5.000.000**	**1**	**2.000.000**	**1**	**100.000.000**	**1**	**5.000.000**	**1**	**5.000.000**	
		Mesin Potong Rumput	Unit	1	5.000.000	0	-	0	-	1	5.000.000	1	5.000.000	
		Mesin Gergaji	Unit	0	-	1	2.000.000	0	-	0	-	0	-	
		Generator Set	Unit	0	-	0	-	1	106.000.000	0	-	0	-	
02.10	**Pengadaan mebeleur**	**Jumlah Jenis mebel yang diadakan**	**Jenis**	**5**	**204.000.000**	**7**	**173.000.000**	**6**	**244.000.000**	**7**	**421.000.000**	**8**	**395.000.000**	
		Kursi rapat	Unit	50	70.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	100	75.000.000	
		Kursi Rapat eselon II	Unit	4	36.000.000	0	-	0	-	4	36.000.000	0	-	
		Kursi eselon II	Unit	0	-	1	10.000.000	0	-	0	-	1	10.000.000	
		Kursi eselon III	Unit	0	-	4	20.000.000	0	-	6	60.000.000	0	-	
		Kursi eselon IV	Unit	8	48.000.000	0	-	0	-	0	-	18	90.000.000	
		Kursi staf	Unit	0	-	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Meja rapat	Unit	0	-	10	30.000.000	0	-	10	30.000.000	0	-	
		Meja eselon II	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Meja eselon III	Unit	0	-	2	6.000.000	3	9.000.000	0	-	6	20.000.000	
		Meja eselon IV	Unit	0	-	6	12.000.000	0	-	0	-	18	40.000.000	
		Kursi sofa	Unit	1	20.000.000	0	-	0	-	3	100.000.000	0	-	
		Rak arsip	Unit	0	-	0	-	10	100.000.000	10	100.000.000	10	100.000.000	
		Meja staf	Unit	0	-	0	-	10	20.000.000	0	-	20	40.000.000	
		Meja Resepsionis	Unit	1	30.000.000	0	-	1	20.000.000	0	-	0	-	
02.13	**Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor**	**Jumlah gedung kantor yang dipelihara**	**Unit**	**4**	**88.250.000**	**1**	**25.000.000**	**1**	**55.000.000**	**4**	**295.000.000**	**3**	**200.000.000**	Kasubag Umum & Kepegawaian
		pengecatan gedung kantor	Unit	1	44.500.000	1	25.000.000	1	55.000.000	1	45.000.000	0	-	
		pengecatan pagar	Unit	1	12.500.000	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	
		pengecatan plangson	Unit	1	5.000.000	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		pemeliharaan wallpaper aula,ruang rapat,darmawanita,ruang makan,ruang transit,ruang kepala,lobby	Unit	1	26.250.000	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	
		Pengecatan aula	Unit	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	0	-	
		Pengecatan ruang makan	Unit	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	0	-	
02.15	**Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional**	**Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala**	**Unit**	**20**	**71.500.000**	**20**	**80.000.000**	**20**	**80.000.000**	**20**	**80.000.000**	**20**	**80.000.000**	
02.17	**Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor**	**Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara**	**Jenis**	**2**	**9.130.000**	**1**	**9.600.000**	**2**	**10.800.000**	**1**	**9.600.000**	**1**	**9.600.000**	
		pemeliharaan ac	Unit	13	7.930.000	16	9.600.000	16	9.600.000	16	9.600.000	16	9.600.000	
		Pemeliharaan Sound System	Unit	2	1.200.000	0	-	2	1.200.000	0	-	0	-	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
02.19	**Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor**	**Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala**	**Jenis**	**1**	**3.750.000**	**2**	**12.100.000**	**2**	**12.100.000**	**2**	**12.600.000**	**2**	**12.600.000**	
		pemeliharaan potong rumput	Unit	2	3.750.000	3	8.000.000	3	8.000.000	3	8.500.000	3	8.500.000	
		pemeliharaan mesin gergaji	Unit	0	-	1	4.100.000	1	4.100.000	1	4.100.000	1	4.100.000	
02.23	**Rehab sedang/berat gedung kantor**	**Jumlah gedung kantor yang diperbaiki/rehab**	**Unit**	**-**	**-**	**3**	**650.000.000**	**3**	**342.500.000**	**6**	**720.000.000**	**3**	**500.000.000**	
		Rehab Atap Kantor	Unit	0	-	1	400.000.000	0	-	0	-	1	200.000.000	
		Rehab Kusen Pintu&Jendela	Unit	0	-	0	-	1	200.000.000	0	-	0	-	
		Rehab Instalasi Listrik	Unit	0	-	1	125.000.000	0	-	0	-	1	100.000.000	
		Rehab Ruang Transit	Unit	0	-	1	125.000.000	0	-	0	-	0	-	
		Rehab Lobby	Unit	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	0	-	
		Rehab Aula	Unit	0	-	0	-	1	80.000.000	0	-	0	-	
		Rehab Ruang Makan	Unit	0	-	0	-	1	62.500.000	0	-	0	-	
		Rehab Ruang Darma Wanita	Unit	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	0	-	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Rehab Ruang Arsip	Unit	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	0	-	
		Rehab Ruang Kerja	Unit	0	-	0	-	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	
		Rehab Parkiran	Unit	0	-	0	-	0	-	2	220.000.000	0	-	
00.0.03	**Program peningkatan disiplin aparatur**	**Tingkat kepatuhan aparatur**	**%**	**80**	**73.500.000**	**80**	**66.000.000**	**90**	**78.000.000**	**90**	**78.000.000**	**90**	**88.000.000**	**Sekretaris**
03.01	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah mesin/kartu absensi	unit	1	7.500	-	-	-	-	-	-	1	10.000.000	Kasubag. Keuangan & Aset
03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya yang diadakan	Orang	60	33.000.000	60	33.000.000	65	39.000.000	65	39.000.000	65	39.000.000	Kasubag Umum & Kepegawaian
03.05	Pengadan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu yang diadakan	Orang	60	33.000.000	60	33.000.000	65	39.000.000	65	39.000.000	65	39.000.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
00.0.04	**Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS**	**Tingkat fasilitasi pindah/purna tugas PNS**	**%**	**80**	**20.000.000**	**80**	**20.000.000**	**90**	**20.000.000**	**90**	**26.000.000**	**90**	**30.000.000**	**Sekretaris**
04.01	Pemulangan pegawai yang pensiun	Jumlah pegawai pensiun yang dipulangkan	Orang	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	26.000.000	1	30.000.000	Kasubag Umum&Kepegawaian
00.0.06	**Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan**	**%**	**80**	**23.370.000**	**80**	**24.852.000**	**90**	**26.064.192**	**90**	**28.433.359**	**90**	**28.500.000**	**Sekretaris**
06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Dok	1	450.000	1	1.712.000	1	2.712.000	1	3.000.000	1	3.000.000	Kasubag. Perenc. Pelaporan. & Pengendalian Program
06.02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Jumlah laporan keuangan semesteran	Laporan	1	225.000	1	140.000	1	352.192	1	433.359	1	500.000	Kasubag. Keuangan &

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcame) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
06.04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Pemenuhan laporan keuangan akhir tahun	Laporan	1	22.695.000	1	23.000.000	1	23.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Aset
Total Belanja A				**3.536.589.400**		**2.890.111.500**		**2.909.222.030**		**3.814.364.759**		**4.732.318.836**		

Lampiran Tabel. Rinci Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2018-2022

BAPPEDA Kabupaten Kotawaringin Barat

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
40.7.15	**Program Penelitian dan Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Persentase hasil penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan**	**%**	**80**	**314.813.000**	**80**	**801.000.000**	**90**	**1.337.000.000**	**90**	**2.150.000.000**	**90**	**1.700.000.000**	**Kepala Bidang Penelitian dan perencanaan pembangunan daerah**
15.01	Review RPJPD	Jumlah dokumen review RPJPD yang dihasilkan	Dok	-	-	-	-	1	550.000.000	-	-	-	-	Kasubid Perencanaan Daerah
15.02	Review RPJMD	Jumlah dokumen review RPJMD yang dihasilkan	Dok	-	-	1	250.000.000	-	-	1	250.000.000	-	-	
15.03	Penyelenggaraan musrenbang RPJMD	Terlaksanannya kegiatan musrenbang RPJMD	Keg.	-	-	-	-	-	-	1	650.000.000	-	-	
15.04	Penetapan RPJMD	Jumlah dokumen RPJMD yang dihasilkan	Dok	-	-	-	-	-	-	-	-	1	350.000.000	
15.05	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Jumlah musrenbang yang dilaksanakan	Keg.	8	169.138.000	8	190.000.000	8	260.000.000	8	300.000.000	8	350.000.000	
15.06	Penyusunan rancangan RKPD	Jumlah dokumen rancangan RKPD yang dihasilkan	Dok	2	19.500.00	2	50.000.000	2	60.000.000	2	100.000.000	2	125.000.000	
15.07	Penetapan RKPD	Jumlah dokumen RKPD yang ditetapkan	Dok	2	51.875.000	2	61.000.000	2	67.000.000	2	100.000.000	2	125.000.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
15.08	Penyusunan, pengumpulan dan pengelolaan data dan informasi	Tersusunnya data dan informasi pembangunan daerah	%	100	36.000.000	100	50.000.000	100	100.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	Kasubid Data dan Informasi
15.09	Penelitian dan pengembangan IPTEK dan kebijakan pembangunan	Jumlah fasilitasi koordinasi penelitian&pengembangan pembangunan daerah	Kali rapat	4	38.300.000	10	200.000.00	10	300.000.000	10	500.000.000	10	50.000.000	Kasubid Penelitian dan Pengembangan
40.3.15	**Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah**	**Presentase pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan rencana**	**%**	**80**	**657.849.600**	**80**	**879.288.500**	**90**	**990.736.000**	**90**	**1.261.505.000**	**90**	**1.500.000.000**	**Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**
15.01	Pengendalian Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang tersusun	Laporan	12	176.950.000	12	322.135.000	12	370.620.000	12	401.505.000	12	450.000.000	Kasubid Pengendalian Pembangunan
15.02	Pengembangan dan Updating Sistem Informasi Pembangunan Daerah	Jumlah sistem informasi yang dikembangkan	Sistem informasi	3	326.000.000	3	247.500.000	3	300.000.000	3	500.000.000	3	600.000.000	Kasubid Pengendalian Pembangunan

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
15.03	Penyusunan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan pembangunan	Laporan	5	108.250.000	5	171.585.000	5	175.320.000	5	200.000.000	5	250.000.000	Kasubid Evaluasi dan Analisa Perencanaan
15.04	Penyusunan Laporan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen pelaporan	Dok	4	46.649.600	4	138.068.500	4	144.796.000	4	160.000.000	4	200.000.000	Kasubid Pelaporan
40.3.16	**Program perencanaan pembangunan sarana-prasarana wilayah dan lingkungan hidup**	**Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sarana Prasarana yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan**	**%**	**80**	**180.545.000**	**80**	**1.140.000.000**	**90**	**1.510.000.000**	**90**	**1.250.000.000**	**90**	**950.000.000**	**Kepala Bidang Sarana dan Prasarana**
16.01	**Penyusunan perencanaan program pembangunan prasarana perhubungaan dan infrastruktur**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Perhubungan dan Infrastruktur**	**Dok**	**1**	**60.775.000**	**4**	**480.000.000**	**3**	**500.000.000**	**2**	**200.000.000**	**2**	**300.000.000**	Kasubid Prasarana Perhubungan dan Prasarana
		Penyusunan Perencanaan Konsep Integrasi Transportasi di kota Pangkalan Bun	Dok	0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Penyusunan Perencanaan Pengembangan Data Base Jaringan Jalan di Kabupaten Kotawaringin Barat	Dok	0	-	0	-	1	400.000.000	0	-	0	-	Kasubid Prasarana Perhubungan dan Prasarana
		Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Lap	1	60.775.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	
		Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Pembangunan dibidang Pekerjaan Umum & Penataan Ruang, Perumahan & Permukiman, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lingkungan Hidup	Lap	0	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	
		Koordinasi Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) & Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Lap	0	-	1	80.000.000	0	-	0	-	0	-	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
16.02	**Penyusunan perencanaan program pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**	**Dok**	**1**	**57.800.000**	**2**	**360.000.000**	**2**	**535.000.000**	**2**	**575.000.000**	**1**	**150.000.000**	Kasubid SDA dan Lingkungan Hidup
		Dokumen Pengelolaan Sumber Daya Alam Kabupaten Kotawaringin Barat	Dok	0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	
		Dokumen PengelolaanLingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Dok	0	-	0	-	1	475.000.000	0	-	0	-	
		Dokumen Rencana Rehabilitasi Lingkungan Eks Pertambangan Pasir Zirkon Kab. Kotawaringin Barat	Dok	0	-	0	-	0	-	1	475.000.000	0	-	
		Laporan Monitoring dan Evaluasi Sumber Daya Alam Kab. Kotawaringin Barat	Lap	0	-	1	60.000.000	1	60.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	
		Monitoring dan Evaluasi Bidang Sarpras	Lap	1	57.800.000		-		-		-		-	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
16.03	**Penyusunan perencanaan program pembangunan pengembangan wilayah dan tata ruang**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang**	**Dok**	**1**	**61.970.000**	**1**	**300.000.000**	**1**	**475.000.000**	**1**	**475.000.000**	**1**	**500.000.000**	Kasubid Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang
		Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Jalan Jendral Ahmad Yani (0 - 20 km)	Dok	0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	
		Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Jalan Jendral Ahmad Yani (20 - 40 km)	Dok	0	-	0	-	1	475.000.000	0	-	0	-	
		Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Jalan Jendral Ahmad Yani (40 - 60 km)	Dok	0	-	0	-	0	-	1	475.000.000	0	-	
		Penyusunan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2017-2037	Dok	0	-	0	-	0	-	0		1	475.000.000	
		Koordinasi penetapan rencana pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Lap	1	61.970.000	0	-	0	-	0	-	0	-	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
40.3.17	**Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi**	**Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan ekonomi yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan**	**%**	**80**	**370.500.000**	**80**	**1.316.100.000**	**90**	**1.490.145.000**	**90**	**1.850.000.000**	**90**	**2.150.000.000**	**Kepala Bidang Ekonomi**
17.01	**Penyusunan perencanaan program pembangunan pertanian dalam arti luas**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang pertanian dalam arti luas**	**Dok**	**2**	**150.500.000**	**3**	**438.700.000**	**3**	**350.145.000**	**3**	**650.000.000**	**3**	**750.000.000**	Kasubid Pertanian
		Dokumen masterplan perenc. pengemb. Pemb. hortikultura kab.Kobar	Dok	0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0		
		Dokumen masterplan perencanaan pengembangan produk unggulan daerah kab.Kobar	Dok	1	125.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Dokumen masterplan perenc. pengembangan pembangunan sapi potong kab.Kobar	Dok	0	-	0	-	0	-	0	-	1	450.000.000	
		dokumen Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan pangan Kab. Kobar	Dok	0	-	0	-	1	250.000.000	0	-	0	-	
		Dokumen Kajian Potensi Perikanan perairan umum daerah	Dok	0	-	0	-	0	-	1	450.000.000	0	-	
		Laporan hasil rapat- rapat koordinasi pembangunan perencanaan pertanian	Lap	1	25.500.000	1	100.000.000	1	50.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	
		Laporan hasil monitoring, evaluasi perencanaan pertanian	Lap	0	-	1	38.700.000	1	50.145.000	1	100.000.000	1	150.000.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
17.02	**Penyusunan perencanaan program pembangunan perdagangan, industri dan investasi**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang perdagangan, industri dan investasi**	**Dok**	**2**	**147.000.000**	**3**	**438.700.000**	**3**	**595.000.000**	**3**	**550.000.000**	**3**	**700.000.000**	Kasubid Perdagangan, Industri & Investasi
		Dokumen kajian penyusunan profile investasi daerah Kab.Kobar	Dok	0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	
		Dokumen penyusunan rencana pengembangan IKM daerah (IKM)	Dok	0	-	0	-	1	450.000.000	0	-	0	-	
		Dokumen penyusunan perencanaan pengembangan pembangunan pasar rakyat daerah	Dok	0	-	0	-	0	-	0	-	1	400.000.000	
		Dokumen review ICOR	Dok	1	125.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Dokumen kajian Pengembangan& peningkatan komoditas ekspor daerah	Dok	0	-	0	-	0	-	1	350.000.000	0	-	
		Laporan hasil rapat-rapat perencanaan Pembngunan Perdagangan industri dan investasi	Lap	1	22.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	
		Laporan hasil monev perencanaan perdagagangan,industri dan investasi	Lap	0	-	1	38.700.000	1	45.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
17.03	**Penyusunan perencanaan program pembangunan ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata**	**Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata**	**Dok**	**2**	**73.000.000**	**3**	**438.700.000**	**3**	**545.000.000**	**3**	**650.000.000**	**3**	**700.000.000**	Kasubid Ketenagakerjaan, Koperasi dan Pariwisata
		Dokumen penyusunan perencanaan Pengembangan Pembangunan ekonomi kreatif mendukung kepariwisataan daerah	Dok	0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	0	-	
		Dokumen analisa potensi lapangan kerja	Dok	0	-	0	-	1	400.000.000	0	-	0	-	
		Dokumen perencanaan Pengembangan Pembangunan Database koperasi & Usaha mikro daerah	Dok	0	-	0	-	0	-	1	450.000.000	0	-	
		Dokumen Penyusunan inventarisasi permasalahan dan perumusan strategi program pembangunan pariwisata kab.kobar	Dok	0	-	0	-	0	-	0	-	1	400.000.000	
		Laporan hasil rapat koordinasi perencanaan PembangunanBidang ekonomi	Lap	1	21.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
		laporan hasil monev perencanaan Bidang ekonomi	Lap	1	52.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Laporan hasil rapat koordinasi perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	Lap	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		laporan hasil monev perencanaan Ketenagakerjaan, koperasi dan pariwisata	Lap	0	-	1	38.700.000	1	45.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	
40.3.18	**Program Perencanaan Sosial dan Pemerintahan**	**Persentase data dan informasi perencanaan pembangunan Sosial Pemerintahan yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan**	**%**	**80**	**715.350.000**	**80**	**1.753.500.000**	**90**	**1.873.200.000**	**90**	**1.750.000.000**	**90**	**2.300.000.000**	**Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan**
18.01	**Kegiatan Penyusunan Peren.Program Pembangunan Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan**	**Dok**	**2**	**220.550.000**	**2**	**351.650.000**	**3**	**609.499.996**	**2**	**550.000.000**	**1**	**300.000.000**	Kasubid Pendidikan, Pemuda & Olahraga
		Tersedianya Dokumen Pengembangan Data & Pemetaan Kualitas Pendidikan	Dok	1	180.000.000	1	250.000.000	0	-	0	-	0	-	
		Tersedianya Dokumen Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang Pendidikan	Dok	0	-	0	-	1	250.000.000	0	-	0	-	
		Tersedianya Dokumen Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang Budaya	Dok	0	-	0	-	0	-	1	350.000.000	0	-	
		Tersedianya Dokumen Analisa dan Kajian Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	Dok	0	-	0	-	1	250.000.000	0	-	0	-	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanan Pembangunan bidang Pendidikan, Pemuda, Olah Raga dan Kebudayaan	Kali rapat	3	40.550.000	12	65.650.000	12	67.500.000	12	100.000.000	12	150.000.000	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang bidang Pendidikan, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan	Kali	0	-	6	36.000.000	6	42.000.000	6	100.000.000	6	150.000.000	
18.02	**Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Kesehatan dan Sosial**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial**	**Dok**	**2**	**246.400.000**	**6**	**1.100.350.000**	**4**	**704.200.000**	**2**	**650.000.000**	**3**	**1.300.000.000**	Kasubid Kesehatan dan Sosial
		Tersedianya Dokumen Analisa dan kajian Pembangunan Kesehatan	Dok	0	-	0	-	1	300.000.000	0	-	0	-	
		Tersedianya Dokumen Analisa dan kajian Pembangunan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dok	0	-	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	
		Tersedianya Dokumen Pengembangan Puskesmas Unggulan Berbasis Potensi	Dok	0	-	1	250.000.000	0	-	0	-	0	-	
		Terlaksananya Rapat koordinasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	Kali	0	-	2	12.500.000	2	12.500.000	2	100.000.000	2	150.000.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Tersedianya Data Base Keluarga	Desa /Kel.	0	-	94	250.000.000	0	-	0	-	94	400.000.000	Kasubid Kesehatan dan Sosial
		Tersedianya Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD)	Dok	1	180.000.000	0	-	0	-	0	-		-	
		Tersedianya Laporan Rencana Aksi Daerah kegiatan TKPKD	Dok	1	66.400.000	2	61.200.000	2	57.200.000	2	100.000.000	2	150.000.000	
		Tersedianya Dokumen Analisa dan Kajian Percepatan Pencapaian Target SDGs	Dok	0	-	1	200.000.000	0	-	0	-	0	-	
		Terlaksananya Rapat koordinasi Kabupaten Layak Anak	Kali	0	-	2	12.500.000	2	12.500.000	2	100.000.000	2	150.000.000	
		Terlaksananya Rapat Koordinasi Penggganggaran Responsif Gender	Kali	0	-	2	12.500.000	2	12.500.000	2	100.000.000	2	150.000.000	
		Tersedianya Dokumen Analisa & Kajian Pembangunan Kesehatan	Dok	0	-		-	1	200.000.000		-		-	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Kesehatan dan Sosial	Kali Rapat	0	-	12	65.650.000	12	67.500.000	12	125.000.000	12	15.000.000	
		Terlaksananya Monitoring & Evaluasi Pembangunan Bidang Kesehatan & Sosial	Kali	0	-	6	36.000.000	6	42.000.000	6	125.000.000	6	15.000.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
18.03	**Kegiatan Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Pemerintahan dan Aparatur**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur**	**Dok**	**2**	**248.400.000**	**2**	**301.500.000**	**2**	**559.500.000**	**2**	**550.000.000**	**2**	**700.000.000**	Kasubid Pemerintahan dan Aparatur
		Tersedianya Doumen Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan	Dok	0	-	1	200.000.000	1	200.000.000	1	300.000.000	1	400.000.000	
		Penyusunan Analisa dan Kajian Pengembangan Sumberdaya Aparatur	Dok	0	-	0	-	1	250.000.000	0	-	0	-	
		Tersedianya Dokumen Kajian Akademik Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan/Desa	Dok	1	180.000.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Aparatur	Kali Rapar	3	9.900.000	12	65.500.000	12	67.500.000	12	125.000.000	12	150.000.000	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan aparatur	Kali	0	-	6	36.000.000	6	42.000.000	6	125.000.000	6	150.000.000	

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Target Kinerja Program daan Kerangka Pendanaan (dalam juta rupiah)										Penanggung Jawab
				2018		2019		2020		2021		2022		
				target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Bidang Sosial Pemerintahan	Kali	4	58.500.000	0	-	0	-	0	-	0	-	
TOTAL BELANJA B					**2.239.057.600**		**5.889.888.500**		**7.201.081.000**		**8.261.505.000**		**8.600.000.000**	
Total Belanja Langsung					**5.775.647.000**		**8.780.000.000**		**10.110.303.030**		**12.075.869.759**		**13.332.318.636**	

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Drs. WAHYUDI, M.Si
NIP. 19[illegible]23 199003 1 010